

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Disusun Oleh:

WIWI SAPITRI

1148010317

BANDUNG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

WIWI SAPITRI

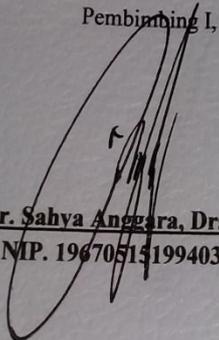
1148010317

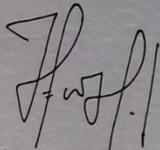
Telah disahkan dan disetujui pada tanggal , 2018

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si
NIP. 196705151994031006


Meli Fauziah M.A
NIP. 198105022006423003

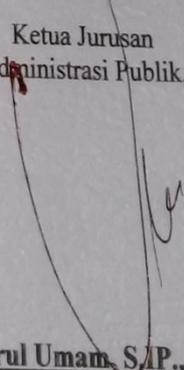
Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Ketua Jurusan
Administrasi Publik,




Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si
NIP. 196705151994031006


Khaerul Umam, S.P., M.Ag
NIP. 198611212009011002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT" ini telah dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqosyah, tanggal 02 Juli 2018 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Oleh:

WIWI SAPITRI

NIM. 1148010317

Bandung, Juli 2018

Menyetujui,

Ketua Majelis,

Sekretaris Majelis,



Dr. H. Encup Supriatna, Drs.

NIP. 196304251990031001

Penguji I,

Drs. Moh. Anif Arifani, M. Ag

NIP. 196810281994031006

Penguji II,

Husen Saeful Anwar, S. Sos., M. Si

NIP. 195905121987031005

Dr. H. Asep Abdul Sahid, M. Si

NIP. 197512272007101003

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIWI SAPITRI
NIM : 1148010317
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi :

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya di atas, adalah asli dan belum pernah dipublikasikan.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bandung, 25 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



WIWI SAPITRI

NIM. 1148010317

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwi Sapitri
NIM : 1148010317
Jurusan / Prodi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat**”, benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini tidak terdapat unsur *plagiarism*.

Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan *plagiarism*, maka skripsi yang diajukan itu dapat ditarik kembali beserta gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 24 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Wiwi Sapitri
NIM. 1148010317

PROFIL SINGKAT PENELITI



Peneliti bernama lengkap Wiwi Sapitri, lahir di Bandung, pada tanggal 10 juli 1995. Peneliti adalah putrid pertama dari dua bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Ipah Saripah. Peneliti tinggal di Kp. Bobojong Rt 01 /02 Ds. Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Huda 2002. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Bojong Wangi pada tahun 2002 – 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan kesekolah menengah pertama di SMP Yayasan Pendidikan Islam Indonesia (YPII) Cililin pada tahun 2008 – 2011. Melanjutkan sekolah menengah pertama di SMK YPII Cililin jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2011-2014. Dan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik Konsentrasi Keuangan Sektor Publik pada tahun 2014-2018. Selain pendidikan formal, pendidikan informal yang ditempuh oleh peneliti di pesantren Mahad Aljamiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2014-2015.

Selama menempuh pendidikan, peneliti aktif dalam organisasi baik intra atau pun ekstra dari sekolah maupun kampus, yaitu :

1. Ketua Osis SMP YPII Cililin periode 2009-2010
2. Ketua Osis SMK YPII Cililin periode 2012-2013
3. Sekertaris Divisi Dana Usaha Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2016
4. Kepala Divisi Dana Usaha Paduan Suara Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2017

ABSTRAK

Wiwi Sapitri “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ”

Adanya otonomi daerah mengharuskan daerah mengelola, mengurus serta menggali potensi yang ada. Tak terkecuali dalam hal mengelola keuangan untuk memajukan dan membangun daerah kearah yang lebih baik. Dalam pengelolaan keuangannya, Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun berturut-turut sampai saat ini tahun 2016 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Penegcualian) dari BPK yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017, artinya dalam pelaksanaan mengelola keuangan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga harus diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada pengelolaan keuangan periode selanjutnya. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat belum dapat meningkatkan kinerja keuangannya selama lima tahun berturut-turut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh pengelolaan kuangan yang terdiri dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparasni, dan pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan.

Metode dalam penelitian ini deskriptif asosiatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 29 OPD yaitu 85 responden. Data yang digunakan adalah data primer dari responden yaitu kuesioner dengan analisis menggunakan SPSS. Untuk mendapatkan hasil menggunakan regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini tidak terdapat pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $-1,069 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,288 > 0,05$ maka H1 ditolak. Terdapat pengaruh *value for money*(X2) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan dapat dilihat dari uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $3,690 > t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima. Tidak terdapat pengaruh kejujuran (X3) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $1,102 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,274 > 0,05$ maka H3 ditolak. Tidak terdapat pengaruh transparansi (X4) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $0,684 < t$ tabel $1,667$ dengan taraf signifikansi $0,496 > 0,05$ maka H4 ditolak Terdapat pengaruh pengendalian (X5) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil perolehan uji parsial dengan nilai t hitung sebesar $6,776 > t$ tabel $1,667$

dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H5 diterima. Hasil analisis pengujian regresi secara simultan dengan uji $-F$ menunjukkan nilai F hitung sebesar $37,670 >$

F tabel 2,33 dengan taraf signifikansi 5 % maka H₀ diterima, hal ini menunjukkan dimensi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi yaitu R² (*R Square*) sebesar 0,839 atau 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu pengelolaan keuangan (akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian) terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 70,3% sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : *Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “**Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.**” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya.

Adapun tujuan dari Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Disamping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam poses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Dr. Sahya Anggara, Drs., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus

menjadi Dosen Pembimbing 1 yang memberikan bimbingan juga arahan kepada peneliti.

3. Khaerul Umam, S.IP., SE., M. Ag selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Meli Fauziah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimng II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, semangat, arahan dan masukan-masukan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada peneliti.
5. M. Sandi Marta, SE., MM selaku Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku objek penelitian oleh peneliti.
7. Keluarga besar peneliti khususnya orang tua yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril atau materi kepada peneliti.
8. Muhammad Imran Sadeli, S.T selaku kakak, teman sekaligus pembimbing yang selalu ada ketika peneliti dalam kebimbangan, memberikan arahan, masukan, dan juga semangat serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.

9. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya, akhirnya dengan mengucapkan syukur “Alhamdulillahirobil’alamin” semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamua’alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.

Bandung, Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Rumusan Masalah.....	14
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	16
1.6. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB II PEMBAHASAN	25
2.1. Penelitian Terdahulu	25
2.2. Konsep Administrasi Publik	33
2.3. Konsep Kinerja Pemerintah Daerah.....	35
2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah	48
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1. Objek Penelitian.....	64
3.2. Metode Penelitian	64
3.3. Operasional Variabel	66

3.4. Populasi dan Sampel.....	69
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.6. Instrumen Penelitian	72
3.7. Validitas dan Realibilitas Instrumen.....	73
3.8. Analisis Data Regresi Linier Berganda.....	76
3.9. Pengujian Hipotesis	77
3.10. Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	79
3.11. Tempat Penelitian.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
4.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	81
4.2. Analisis Karakteristik Responden.....	91
4.3. Teknik Analisis Data.....	99
4.4. Pengujian Instrumen	114
4.5. Pengujian Hipotesis	120
4.6. Pembahasan.....	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	144
5.1. Kesimpulan	144
5.2. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	67
Tabel 3.2 Daftar SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada Bagian Keuangan.....	69
Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi	80
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	92
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	94
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	95
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa/Lama Kerja	96
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Dinas / Instansi	97
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Akuntabilitas N=85.....	100
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Dimensi <i>Value For Money</i> N=85.....	102
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kejujuran N=85	104
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Transparansi N=85.....	106
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pengendalian N=85.....	107
Tabel 4.12 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat N=85	109
Tabel 4.13 Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat N=85	112

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan (Variabel X).....	115
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Y).....	116
Tabel 4.16 Hasil Uji Realibilitas Dimensi Akuntabilitas (Variabel X1)	117
Tabel 4.17 Hasil Uji Realibilitas Dimensi <i>Value For Money</i> (Variabel X2).....	117
Tabel 4.18 Hasil Uji Realibilitas Dimensi Kejujuran (Variabel X3).....	118
Tabel 4.19 Hasil Uji Realibilitas Dimensi Transparansi (Variabel X4)	118
Tabel 4.20 Hasil Uji Realibilitas Dimensi Pengendalian (Variabel X5)	119
Tabel 4.21 Hasil Uji Realibilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Y).....	119
Tabel 4.22 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	120
Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan	130
Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinasi Variabel X1, X2, X3, X4. Dan X5 terhadap Variabel Y	132
Tabel 4.25 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi ...	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Bandung Barat	86
Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Bandung Barat	89
Gambar 4.3 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Gambar 4.4 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	93
Gambar 4.5 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	94
Gambar 4.6 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	95
Gambar 4.7 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Masa / Lama Kerja.....	97
Gambar 4.8 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Dinas / Instansi ...	98
Gambar 4.9 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial Akuntabilitas terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	124
Gambar 4.10 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial <i>Value For Money</i> terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	125
Gambar 4.11 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial Kejujuran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	126
Gambar 4.12 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial Transparansi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	128
Gambar 4.13 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial Pengendalian terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	129
Gambar 4.14 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 2007. Kabupaten Bandung Barat terpisah secara administratif dari Kabupaten Bandung mulai bulan Oktober 2007 tentunya dengan memiliki APBD sendiri.

Keberadaan Pemerintah Daerah tak terkecuali untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ini berdasarkan pada masa reformasi muncul istilah otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Rosidin, 2010 : 5).

Hal tersebut dilakukan karena pada masa orde lama dianggap gagal dengan konsep sentralistiknya. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sebelumnya tersentralistik.

Dilihat dari pencapaian kinerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang kini sudah berusia satu dekade masih banyak yang harus diperbaiki dalam berbagai aspek. Ada 5 aspek yang harus dipenuhi dan diperbaiki dalam kinerja pemerintahan menurut Mahsun (2006:77) yaitu “masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Kinerja pemerintah daerah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dalam mewujudkan visi , misi, tujuan dan

sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya serta mematuhi aturan yang berlaku.”

Tercatat Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat Opini tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disebut juga *disclaimer* yang dilansir oleh inilah.com (2011) menyatakan “Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tiga kali berturut-turut mendapat predikat *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Opini Tidak Menyatakan Pendapat ini artinya auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. “Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar”.(www.BPKADBanjar.com, 2015).

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kelima kalinya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP). Dimana Opini WDP ini diberikan karena Menurut Sekda KBB Maman Sunjaya yang dilansir dari Pikiran Rakyat (2017) “Penyebab gagalnya pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan asset, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Tingkat SD dan SMP serta Piutang Pajak Bumi dan Bangunan”.Serta banyak rekomendasi dari BPK untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan maupun ada kesalahan di tahun lalu tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat ini sehingga untuk kesekian kali nya Kabupaten Bandung Barat harus menerima opini WDP.

Penerimaan opini dari BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima WDP dari Hasil Pemeriksaan BPK ini dirasa gagal dalam memperbaiki kinerja pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan karena ditahun yang sama KBB tertinggal dari Kabupaten Pangandaran yang baru diresmikan pada tahun 2012 sekitar 5 tahun yang lalu dan sudah mendapatkan opini WTP, dimana WTP ini adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu mengurus atau mengatur dalam hal perencanaan, pelaksanaan, sampai dalam penyajian laporan keuangan yang sudah terlealisasikan harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengukur pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi serta pengendaliannya (Chabib dan Rochmansjah 2010 : 10). Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di setiap pemerintah daerah sudah dianggap wajar dan mematuhi aturan serta sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka perlunya sebuah pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan salah satu pemerintahan yang dikenal dalam UUD 1945 yang melaksanakan kedaulatan rakyat dibidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintahan. “Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.(Anggara, 2016 : 291-292).

Seperti yang dilansir dihalaman web Merdeka.com, (05 Juni 2017) yang menyatakan bahwa dalam beritanya “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) 2016 yang diserahkan oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada 12 entitas atau pemerintah daerahnya. Dari 12 entitas yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ada 11 entitas, sedangkan yang lainnya ,masih berstatus Wajar dengan Pengecualian (WDP) yaitu Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat” Kata Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa.

Ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 yang

ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017 terdapat 8 temuan kelemahan system pengendalian internal, yaitu :

- 1) Penatausahaan Dana BOS Tidak Tertib dan Penyajian dalam Laporan Operasional Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai penatausahaan dana BOS ini seperti 720 sekolah belum mengajukan ijin pembukaan rekening dana BOS kepada kepala daerah sehingga rekening tersebut belum terdaftar sebagai rekening milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu juga terdapat penemuan penyajian pendapatan BOS yang disajikan dalam LO tahun 2016 sebesar Rp. 186.908.800.000, setelah dikonfirmasi kepada Provinsi Jawa Barat diketahui alokasi untuk dana BOS di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 187.085.300.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 176.500.000.

- 2) Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah (Non PBB) pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Belum dilakukan Secara Memadai.

Berdasarkan laporan rekapitulasi teguran dan BAP diketahui tindak lanjut dari WP berupa pembayaran lunas ataupun angsuran, namun tidak dicantumkan nilai pembayarannya, banyak WP yang belum melakukan pembayaran baik yang sudah diberi teguran maupun belum. Selain itu juga WP yang tidak diketahui keberadaannya apakah aktif / pailit tidak dibuatkan laporan rekapitulasinya sehingga nilai piutang yang tidak dapat terlealisasikan tidak diketahui. Kondisi ini tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP No 02 tentang penyajian laporan yang menyatakan bahwa piutang pajak / retribusi

dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak / retribusi yang pembayarannya belum diterima.

- 3) Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum dilakukan Secara Memadai.
- 4) Penyajian Saldo Persediaan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BP3AKB Tidak Memadai.
- 5) Penyajian Saldo dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum Memadai.
- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat dan Nilai Buku Aset Tetap per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016 Tidak Dapat diyakini Kewajarannya.

Hasil penelusuran rincian aset tetap menunjukkan terdapat belanja pemeliharaan / rehabilitas yang dicatat sebagai aset tetap berdiri sendiri sebesar Rp. 139.852.598.188. Hal tersebut terjadi pada OPD Dinas Binas Marga. Seharusnya diperlakukan sebagai penambahan nilai dan masa manfaat aset tetap induk. Penyusutan secara terpisah dari aset induk akan berdampak terhadap akurasi beban penyusutan, akumulasi penyusutan serta nilai buku aset tetap sebagai dasar penyusutan tahun berikutnya.

- 7) Pencatatan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai.

Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) seperti software Komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, dll. Menurut hasil

review rincian ATB menunjukkan terdapat perangkat lunak sistem operasi sebesar Rp. 20.693.128.390 yang terdiri dari (ex, SIMDA, atisisbada). Pengakuan perangkat lunak tersebut tidak tepat dikarenakan tidak memiliki hak karakteristik istimewa, yaitu dapat dijual, dipindahtangankan, diberi lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Untuk itu tim BPK mengajukan koreksi penghapusan ATB sebesar Rp. 20.693.128.390.

- 8) BLUD RSUD Cililin Belum Menyelenggarakan Akuntansi dan Pelaporan Secara Memadai.

Adapun selain permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internnya, terdapat permasalahan yang terjadi pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Pegawai – Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Belanja Sebesar Rp. 142.540.000.

Ini dikarenakan terdapat pembayaran honorarium melebihi SBB sebesar Rp. 69.765.000 untuk kegiatan Unit Layanan Pengadaan, Monev Progress Tim Evaluasi dan Pengawasan, Realisasi Anggaran (Teptra) OPD serta Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan pad Sekretaris Daerah. Terkait dengan honorarium tim verifikasi dan klarifikasi lapangan diakui bahwa terdapat kelebihan pada pembayaran honorarium pengarah dan penanggungjawab. Selain itu juga terdapat pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam SBB berupa honorarium pembukaan / penutupan kegiatan pada Sekda sebesar Rp. 72.775.000 dimana anggaran tersebut berdsasarkan

pada anggaran yang tercantum dalam DPA-OPD. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 122 ayat 10 dimana pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur dan Belanja Makanan dan Minuman Lembur pada 12 OPD Tdak Memadai dan Terdapat Kelebohan Pembayaran Sebesar Rp. 383. 411. 460.
- 3) Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tujuh OPD Kabupaten Bandung Barat TA 2016 Minimal sebesar Rp. 70.245.995.

Ini terdapat ketidaksesuaian harga yang tercantum dalam tiket maskapai penerbangan dengan hasil konfirmasi sebesar Rp. 39.968.849, terdapat tanggal pelaksanaan tugas yang tumpang tindih sebesar Rp. 8.030.000. Serta terdapat bukti pertanggungjawaban bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan tanggal perjalanan dinas sebesar Rp. 22.247.146. Kondisi ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 70. 245.995.

- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 4.796.106.694,00 tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sebesar-besarnya dan Pengendalian atas Belanja BBM Menggunakan Sistem Voucher belum memadai.

- 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Presentase yang diatur dalam Juknis BOS.

Dimana dalam penggunaan biaya pengembangan perpustakaan kurang dari ketentuan 5% dari penggunaan dana BOS yang seharusnya untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 8.137.737.500 tetapi pada realisasinya biaya pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.676.814.688 sehingga biaya untuk pengembangan perpustakaan berkurang sebesar Rp. 3.460.922.812.

- 6) Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pendapatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 31.395.000.
- 7) Pengeluaran Biaya Operasional Pengadaan (BOP) Pengurusan Penertiban Sertifikat Tanah pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gununghalu oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 125.000.000 tidak sesuai dengan Mekanisme Belanja Daerah.
- 8) Pengelolaan Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat belum memadai dan belum dikenakan Denda sebesar Rp. 38.704.882.

Berdasarkan permasalahan diatas,penelitimenemukan bahwa kinerja pemerintah daerah pada bagian keuangan Kabupaten Bandung Barat masih kurang, dilihat dari dimensi:

- 1) Masukan, dari segi dana sebagai salah satu tolak ukur kinerja ini, tidak sesuai karena pemakaian dana dengan peraturan yang ada, ini dikarenakan penggunaan dana BOS tidak sesuai persentasenya, serta dalam kelebihan pembayaran tidak sesuai dengan SBB.
- 2) Proses, dari segi kecepatan dan ketepatan sebagai tolak ukur kinerja ini masih ada WP yang belum diverifikasi keberadaannya serta dalam penyajian laporan tidak sesuai dengan SAK yang berlaku.
- 3) Keluaran, dari segi produk yang dihasilkan dari kegiatan yang sesuai dengan masukan yaitu penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan persentase, maka untuk pengembangan perpustakaan banyak sarana yang tidak dapat dipenuhi.
- 4) Hasil, dari segi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai masih kurang karena masih banyak penyajian laporan yang dilakukan belum sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga untuk penyajian laporan keuangan masih harus ada perbaikan.
- 5) Manfaat, dari segi kemanfaatan yang dirasakan masih kurang karena banyaknya kelebihan pembayaran yang dilakukan sehingga dana tidak dikelola dengan efektif dan efisien.
- 6) Dampak, dari segi dampak terhadap kondisi makronya adalah mengakibatkan kerugian daerah.

Adapun dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, penulis menemukan masih kurang baik dilaksanakan, sehingga perlunya perbaikan untuk selanjutnya, ini bisa dilihat dari dimensi :

- 1) Akuntabilitas, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena laporan yang disajikan masih terdapat ketimpangan / selisih uang yang diterima dari provinsi kepada daerah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) *Value For Money*, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena adanya ketidakhematan dan ketidakefektifan pembelanjaan dana pegawai dimana banyak kelebihan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan SBB.
- 3) Kejujuran, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena adanya ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan dimana dana untuk belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan harga tiket yang seharusnya.
- 4) Transparansi, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena tidak adanya bukti perjanjian kerjasama dalam pengurusan sertifikat tanah dengan notaris dan PPAT.
- 5) Pengendalian, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena persentase dari dana BOS untuk pengembangan perpustakaan di setiap sekolah tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar 5% hanya dialokasikan kurang dari 5 % ini disebabkan tidak ada pengawasan / pengendalian terlebih dahulu dalam mengalokasikan dana

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada bagian keuangan dilingkungs Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penatausahaan Dana BOS Tidak Tertib dan Penyajian dalam Laporan Operasional Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
- 2) Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah (Non PBB) pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Belum dilakukan Secara Memadai.
- 3) Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum dilakukan Secara Memadai.
- 4) Penyajian Saldo Persediaan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BP3AKB Tidak Memadai.
- 5) Penyajian Saldo dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum Memadai.
- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat dan Nilai Buku Aset Tetap per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016 Tidak Dapat diyakini Kewajarannya.
- 7) Pencatatan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai.
- 8) BLUD RSUD Cililin Belum Menyelenggarakan Akuntansi dan Pelaporan Secara Memadai.

Adapun selain permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internnya, terdapat permasalahan yang terjadi pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Pegawai – Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Belanja Sebesar Rp. 142.540.000.
- 2) Penganggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur dan Belanja Makanan dan Minuman Lembur pada 12 OPD Tdak Memadai dan Terdapat Kelebohan Pembayaran Sebesar Rp. 383. 411. 460.
- 3) Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tujuh OPD Kabupaten Bandung Barat TA 2016 Minimal sebesar Rp. 70.245.995.
- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 4.796.106.694,00 tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sebesarnnya dan Pengendalian atas Belanja BBM Menggunakan Sistem Voucher belum memadai.
- 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Prosentase yang diatur dalam Juknis BOS.
- 6) Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pendapatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 31. 395.000.
- 7) Pengeluaran Biaya Operasional Pengadaan (BOP) Pengurusan Penertiban Sertifikat Tanah pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan

Gununghalu oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 125.000.000 tidak sesuai dengan Mekanisme Belanja Daerah.

- 8) Pengelolaan Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat belum memadai dan belum dikenakan Denda sebesar Rp. 38. 704. 882.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 2) Seberapa besar pengaruh *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Seberapa besar pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 4) Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 5) Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 6) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian secara simultan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Bidang Keuangan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 4) Untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 5) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 6) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai yang baik dalam pengembangan ilmu, khususnya administrasi publik dan mengimplementasikannya dalam kegiatan. Berikut kegunaan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan secara umum mengenai administrasi publik khususnya administrasi keuangan negara.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan,
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat terutama mengenai akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian pengelolaan keuangan periode tahun anggaran 2016, dan
- c. Hasil dari penelitian dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan

perkembangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kinerja Pemerintah daerah, menurut Yunita dan Hendra mendefinisikan Kinerja sebagai “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *Strategik Planning* suatu organisasi” (Yunita dan Hendra, 2010 :180). Kinerja adalah “catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.” Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pemerintah daerah selama aktivitas selama periode tertentu.

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai kinerja pemerintah daerah, Menurut Mahsun (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu :

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada.
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya :

- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :
- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

“Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menurut Halim pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.(Halim dan Iqbal, 2012 :24). Pendapat lain mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang dijadikan dimensi. Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasiadalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakinbaik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebuthanya akan tercapai apabila

penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup, potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

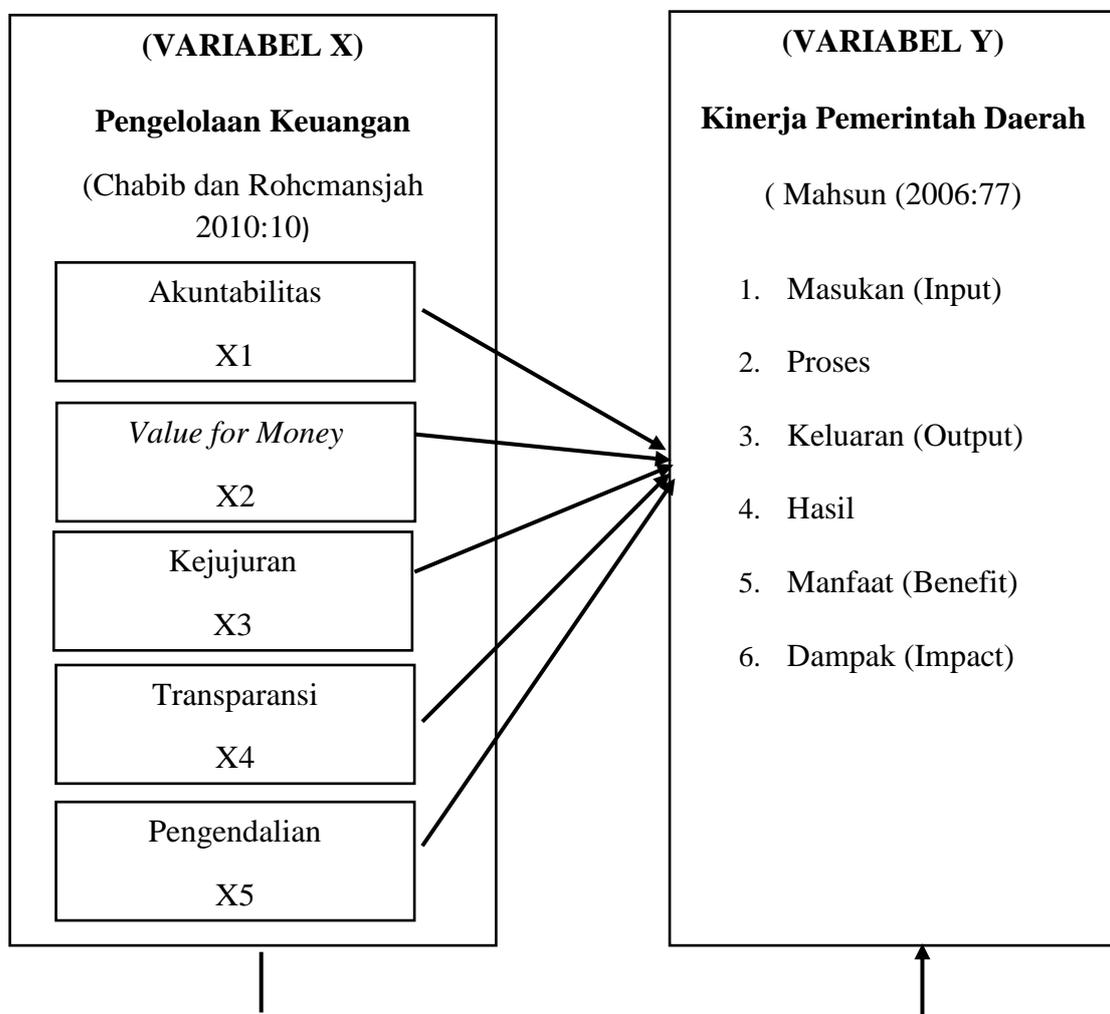
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Bagian Keuangan, peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Upaya untuk mencapai hal itu peneliti mencari teori

pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah sebagai landasan teoritik untuk diuji secara empiris. Melalui teori dan pengamatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Baratpada Bagian Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sabagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono(Sugiyono,2013 : 77) menyatakan “hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis dari judul penelitian yang akan diteliti yaitu **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparaturpemerintah daerahKabupaten Bandung Barat

H2 = Terdapat pengaruh *Value For Money* terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H3 = Terdapat terdapat pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H4 = Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H5 = Terdapat pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H6 = Terdapat pengaruh akuntabilitas,*value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerahKabupaten Bandung Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari berbagai penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dan lokus yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nopriyansyah Putra, Erlina, dan Sari Jurnal Ekonomi, Vol. 19. No. 04, Oktober 2016	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negative tetapi signifikan	1. Variabel (X1) Pengelolaan Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Variabel (Y) Kinerja Pemerintah Daerah 3. Metode regresi linear berganda	1. Variabel X nya ada 3, penulis hanya 1 2. Menggunakan variabel moderasi, penulis tidak. 3. Lokus di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penulis di Kabupaten Bandung Barat.

			terhadap kinerja pemerintah daerah. Manajemen secara simultan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.		
2	Vivid Annisa Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FekonVol. 4 No. 1 Februari 2017	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)	Hasil dari penelitian ini adanya pengaruh positif dan signifikan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel (X2) Pengelolaan Keuangan. 2. Variabel (Y) Kinerja Pemerintah Daerah. 3. Teknik Koesioner 4. Terdapat 85 responden 5. Analisis Menggunakan SPSS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X ada 3, penulis hanya Satu 2. <i>Purposive Sampling</i>, penulis menggunakan <i>Sampling Jenuh</i> 3. Lokus di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sedangkan penulis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3	Ikhwani Ratna, Hidayati Nasrah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 19 No. 1 Januari-Juni 2016.	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Begitu juga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X 2. Variabel (Y2) Kinerja Pemerintah Daerah 3. Kuesioner 4. Skala likert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Y ada 2. Penulis hanya Satu 2. Menggunakan regresi linear sederhana, penulis regresi linear

		Pemerintah Provinsi Riau	dengan penerapan SAKIP juga berada pada kategori baik. Secara statistik variabel pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP		berganda, 3. Responden 78, penulis 85 responden. 4. Lokus di Pemerintah Provinsi Riau sedangkan penulis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
--	--	--------------------------	---	--	---

Berdasarkan Tabel 2.1 tentang uraian penelitian yang disusun oleh beberapa peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dapat di deskripsikan atau di uraikan kembali oleh penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah jurnal yang disusun oleh Nopriyansyah Putra, Erlina, dan Sari dalam Jurnal Ekonomi, Vol. 19. No. 04 , Oktober 2016 yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara”. Pada penelitian tersebut bertujuan mendapatkan bukti empiris apakah ada pengaruh Manajemen Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah dan apakah Pengawasan bisa Memoderasi pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda untuk analisis statistik dan Uji Residual untuk menguji Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sementara Transparansi memiliki pengaruh negative tetapi signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Manajemen secara simultan Pengelolaan Keuangan Daerah , Akuntabilitas, dan Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian terdahulu ini dilatar belakangi karena pada tahun 2014 ini provinsi Sumatera Utara mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah baik. Dimana pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dan berbagai aturan Perundang-undangan telah dibuat yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak pada masyarakat

Dari penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari persamaannya Variabel yang sama dalam penelitian ini yaitu Variabel (Xi) pengelolaan keuangan dan Variabel Y kinerja pemerintah daerah. Menggunakan metode regresi linear berganda. Sedangkan perbedaannya adalah dilihat dari variable X nya berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian ini ada 3 variabel X yaitu Pengelolaan Keuangan , Akuntabilitas dan Transparansi sedangkan penulis Variabel X-nya hanya Pengelolaan Keuangan saja. Selain itu dalam metode menguji variable moderasi penelitian ini

menggunakan Uji Residual sedangkan penulis menggunakan tidak menggunakan metode tersebut karena tidak memakai variabel moderasi. Dalam Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu Pengawasan sedangkan penulis hanya variabel dependen dan independen saja. Lokus dari penelitian ini di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedangkan penulis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari latar belakangnya penelitian terdahulu ini juga berbeda dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Opini WTP dari BPK sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi Karena Kabupaten Bandung Barat lima kali berturut-turut mendapatkan Opini WDP dari BPK.

Penelitian terdahulu yang kedua disusun oleh Vivid Annisa dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM Fekon), Vol. 4 No. 1 Februari 2017 yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Populasinya adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu 22 kantor SKPD dan 10 Badan Pemerintah. Menggunakan *Purposive Sampling* dalam menentukan sampel yaitu Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Program dan Staff Keuangan, serta 3 responden disetiap SKPD. Responden yang dapat diproses yaitu ada 85 responden. Data yang digunakan adalah data primer dari

responden dengan kuesioner dan analisis menggunakan SPSS. Untuk mendapatkan hasil menggunakan Regresi linear Berganda. Hasil dari penelitian ini adanya pengaruh positif dan signifikan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian terdahulu ini dilatarbelakangi banyaknya temuan dari hasil audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya jadwal penyusunan APBD pemerintah Kota Pekanbaru TA 2012 tidak tepat waktu sesuai ketentuan, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) belum sesuai ketentuan, Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dalam enam BUMD dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru belum ditetapkan, dan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru selalu Wajar Dengan Pengecualian.

Dari penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari persamaannya Variabel independen sama yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu (X₂) Variabel Independen sama yaitu Kinerja Pemerintah Daerah (Y), dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik kuesioner , 85 responden, dan untuk analisis menggunakan SPSS. Selain itu latar belakang dari penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu banyak temuan oleh BPK dari Pengelolaan Keuangan Daeranya dan lima kali berturut-turut mendapatkan opini WDP dari BPK. Sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini terdapat 4 variabel yaitu 3 Variabel dependen dan 1 Variabel

independen sedangkan peneliti hanya 2 variabel saja yaitu 1 variabel dependen dan 1 variabel independen.. Dalam menentukan sampel dalam jurnal ini menggunakan *Purposive Sampling* sedangkan penulis menggunakan *sampling jenuh*. Lokus dalam penelitian ini di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sedangkan penulis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya dari penelitian terdahulu yang terakhir yang disusun oleh Ikhwani Ratna, Hidayati Nasrah dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 19 No. 1 Januari-Juni 2016 yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 366 orang. Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus dari slovin dan diperoleh sampel sebanyak 78 orang. Data diperoleh menggunakan kuesioner, dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Begitu juga dengan penerapan SAKIP juga berada pada kategori

baik. Secara statistik variabel Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAKIP.

Dari penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu dari persamaannya Variabel X dan (Y2) dalam penelitian ini sama dengan penulis yang akan diteliti yaitu variabel X Pengelolaan Keuangan dan variabel Y Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan perbedaannya Variabel Y dalam penelitian ini ada 2 yaitu Sistem Akuntansi dan Kinerja Pemerintah Daerah sedangkan penulis hanya ada 1 variabel Y yaitu Kinerja Pemerintah Daerah, dalam menggunakan metode analisis peneliti ini menggunakan Regresi Linear Sederhana sedangkan penulis menggunakan Regresi Linear Berganda, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 responden sedangkan penulis ada 86 responden. Lokus dalam penelitian ini di Pemerintah Provinsi Riau sedangkan penulis di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu yang melatarbelakangi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan program dalam reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan dalam penelitian penulis karena pemerintah Kabupaten Bandung Barat banyaknya temuan dari BPK yang masih harus dikoreksi dalam pengelolaan keuangan dan lima kali berturut-turut mendapatkan opini WDP dari BPK.

2.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi, ditingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi, dan ditingkat bawah yaitu fungsi pengawasan (Anggara, 2012 : 11).

Administrasi menurut Gie yang dikutip oleh Silalahi (2009:9) menjelaskan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bagian tata usaha dalam rangka penataan kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi publik menurut Caiden yang dikutip oleh Lely Indah (2016:4) yaitu “seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik (*administration for the public affairs*)”. Penyelenggaraan atas segenap kepentingan publik dan masalah publik (*public interests and public affairs*) yang ada pada suatu negara, merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik.

Berdasarkan teori diatas menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk memenuhi atau melayani kebutuhan bangsa dan negara (publik).

Bidang persoalan yang dicakup oleh administrasi publik sangatlah luas karena tidak hanya mencakup lembaga eksekutif saja, namun mencakup kegiatan dan hal-hal yang bersifat kepublikan yang diselenggarakan oleh lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Menurut Nigro dan Nigro dikutip oleh Lely Indah (2016:4) administrasi publik suatu proses kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif.

Dari beberapa pengertian administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan kerjasama yang mencakup kepublikan diselenggarakan oleh ketiga lembaga pemerintahannya yakni legislative, eksekutif dan yudikatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara.

Akuntabilitas publik sangat penting, karena pada hakikatnya kepala daerah (pemerintah) adalah milik masyarakat (*people own government*). Sewajarnya seorang kepala daerah mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Dalam kaitan ini, kinerja pemerintah daerah dibawah kepala daerah akan terbuka untuk di cek kebenarannya (*auditable*). Oleh karena itu, laporan akuntabilitas publik harus mencakup beberapa bentuk *accountability*, yakni akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, serta sumber daya manusia, bahkan sumber-sumber lainnya.

Akuntabilitas ini mensyaratkan juga agar kepala daerah tidak hanya menjawab yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi juga menetapkan suatu proses yang berkelanjutan terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping akuntabilitas manajerial, harus pula didukung dengan akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang kesemuanya berjalan sinergis, sehingga seorang kepala daerah benar-benar representasi pemerintahan milik masyarakat dengan orientasi kesejahteraan bersama (Santosa, 2012:142)

2.3. Konsep Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2016 : 26).

2.3.1. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib dan Suripto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah: “Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.”

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai kinerja menurut beberapa ahli.

Menurut Rivai (2004:309) mengemukakan penjelasan tentang kinerja yaitu: “Kinerja sebagai perilaku nyata yang ditampilkan orang kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan “.

Sedangkan pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut menurut Mahsun (2006:25) yaitu :“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Menurut pendapat Soedarmayanti (2001:51) mengatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. “*Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

2. *Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. *Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
4. *Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.
5. *Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis”.

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi.

Menurut beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

2.3.2. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku

penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Chabib dan Suropto(2011:5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

1. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
2. Untuk menemukan kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kekurangberhasilan dari setiap SKPD;
3. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
4. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi.
5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya;

6. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

2.3.3. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib dan Suropto(2011:7) Dilihat dari obyek Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah, dapat dibagi menjadi:

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya.

2. Kinerja Program

Apabila Kinerja Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala subBagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

2.3.4. Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu :

7. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Misalnya:

- e. Jumlah dana yang dibutuhkan.
- f. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
- g. Jumlah infrastruktur yang ada.
- h. Jumlah waktu yang digunakan.

8. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :

- c. Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - d. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
9. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :
- c. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - d. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
10. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya :
- c. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - d. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
11. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :
- c. Tingkat kepuasan masyarakat.

d. Tingkat partisipasi masyarakat.

12. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Peningkatan pendapatan masyarakat.

2.3.5. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Penilaian kinerja juga merupakan proses formal untuk melakukan evaluasi kinerja secara periodik. Menurut Husein (2003:87), pengertian penilaian kinerja adalah: “Penilaian kinerja menilai hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan”.

Penilaian kinerja dapat terpenuhi apabila penilaian mempunyai hubungan dengan pekerjaan dan adanya standar pelaksanaan kerja agar penilaian dapat dilaksanakan secara efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Sedangkan menurut Dharma (2003:376), pengertian penilaian kinerja adalah: “Proses pengambilan keputusan tentang hasil yang dicapai karyawan dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Rivai dan Fauzi (2005:129) menyatakan bahwa Sistem kinerja yang baik sangat bergantung pada persiapan yang benar-benar baik dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. **Praktis.** Keterkaitan langsung dan pekerjaan seseorang adalah bahwa penilaian ditujukan pada perilaku dan sikap yang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
2. **Kejelasan standar.** Standar merupakan tolak ukur seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar memperoleh nilai tinggi, standar itu harus pula mempunyai kompetitif.
3. **Kriteria yang objektif.** Suatu penilaian kinerja dapat dikatakan efektif apabila instrument penilaian kinerja tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. *Reliability.* Ukuran kinerja harus konsisten. Jika ada dua penilaian mengevaluasi pekerja yang sama, mereka perlu menyimpulkan hasil serupa menyangkut hasil mutu kerja.
 - b. *Relevansi.* Ukuran kerja harus dihubungkan dengan *output* riil dari suatu kegiatan yang secara logika itu mungkin.
 - c. *Sensitivity.* Beberapa ukuran mampu mencerminkan antara penampilan nilai tinggi dan rendah. Penampilan tersebut harus dapat membedakan dengan teliti tentang perbedaan kinerja.
 - d. *Practicality.* Criteria harus dapat diukur dari kekurangan data dan tidak terlalu mengganggu atau tidak in-efisien”.

Penilaian kinerja secara regular yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap pegawai. Tindakan ini akan membuat pegawai untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dan searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian kinerja merupakan kondisi yang

harus diketahui dan informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi serta mengetahui dampak yang ada. Menurut Hasibuan (2002:87) menyatakan bahwa :“Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standarkualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan dan karena organisasi pada dasarnya dijelaskan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

2.3.6. Fokus dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Satuan Kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap Satuan Kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah berarti pengukuran kinerja terhadap Satuan Kerja atau entitas di lingkungan Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2006:198), fokus kinerja dapat untuk setiap Satuan Kerja atau entitas mencakup :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia
4. Program kerja
5. Anggaran.

2.3.7. Manfaat Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ulum (2004:277) mengemukakan bahwa manfaat dalam kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati,
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,

- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2.3.8. Ukuran Kinerja

Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif yaitu :

1. Ukuran kriteria tunggal (*Single criterium*). Yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilaikinerja manajernya. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerjanya, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada criteria tersebut sebagai akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan suksese atau tidaknya perusahaan atau bagiannya. Sebagai contoh manajer produksi diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan penting lainnya mengenai mutu, biaya, pemeliharaan equipment dan sumber daya manusia.
2. Ukuran kriteria beragam (*Multiple criterium*). Yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajernya. Kriteria ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada berbagai kinerja. Contohnya

manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria antara lain profitabilitas, pangsa pasar, produktifitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Karena dalam ukuran kriteria beragan tidak ditentukan bobot tiap-tiap kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur kinerjanya, maka manajer akan cenderung mengarahkan usahanya, perhatian, dan sumber daya perusahaannya kepada kegiatan yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan yang terbesar kinerjanya secara keseluruhan. Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang dinilai didalam menilai kinerja menyeluruh manajer, akan mendorong manajer yang diukur kinerjanya menggunakan pertimbangan dan persepsinya masing-masing didalam memberikan bobot terhadap beragan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerjanya.

3. Ukuran kriteria gabungan (*Composite criterium*). Yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya. Karena disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan yang lain, beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragan kriteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer, setelah memperhitungkan bobot beragan kriteria kinerja masing-masing.

2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:137) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

- a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

- b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakilpemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :

“Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Y.R Kabo (2001:61) mengemukakan bahwa :“Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik”.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2.4.2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

c. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

d. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup, potensi kerugian daerah adalah

suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

2.4.3. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah (APBD) didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat daerah terhadap pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel.
2. Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang baru serta peraturan pelaksanaannya.
3. Sistem, prosedur dan format struktur APBD yang berlaku selama ini dinilai kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif. Perencanaan APBD dengan paradigma baru tersebut adalah :
 - a. APBD yang berorientasi pada kepentingan publik
 - b. APBD disusun dengan pendekatan kinerja
 - c. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja
 - d. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah dan Unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan kebijakan.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memperhatikan.

Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Disamping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan pemerataan. Pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan anggaran daerah, dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun hingga saat ini, kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relative rendah. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masih banyak aparatur daerah maupun aparatur pemerintah pusat yang belum sepenuhnya bisa meninggalkan cara berfikir lama. Gejala ini nampak dari ketidakberanian aparatur daerah untuk mengambil keputusan, sekalipun hal itu berada dalam ranah kekuasaannya.

Kebiasaan mohon petunjuk pelaksanaan adalah sesuatu yang sangat lumrah yang menjadi pemandangan keseharian. Akibatnya, proses anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih sentralisasi. Perencanaan anggaran didominasi dan diintervensi oleh pemerintah pusat dalam rangkamengakomodasikan kepentingan pusat di daerah. Kebijakan yang diambil

oleh pemerintah daerah hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat dan atau pemerintah atasan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja tersebut dapat digunakan model Analisis Standar Belanja (ASB). (Chabib dan Heru, 2010) .

2.4.4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.”

2.4.5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat *dan* Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
- d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.”

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan keuangan daerah adalah Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk

mengurus masalah keuangan tetapi juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Halim (2004:84) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian.

2.4.6. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil Pajak Daerah.
 - 2) Hasil Retribusi Daerah.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - 4) Lain-Lain PAD Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil.
 - 2) Dana Alokasi Umum.
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah
 - 1) Pemerintah.

- 2) Pemerintahan Daerah.
 - 3) Lembaga Keuangan Bank.
 - 4) Lembaga Bukan Keuangan Bank.
 - 5) Masyarakat.
4. Lain-Lain Penerimaan Daerah
- 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan hasil daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lainnya.

Adapun teori yang menghubungkan dalam penelitian ini yaitu menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:40) yang menyatakan bahwa:

”Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada.”

2.4.7. Dalil tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan hak anggaran oleh pemerintah dilakukan dengan bermusyawarah, sebagaimana ‘Umar bin Khatab yang mengenakan bea cukai atau ‘Ushr kepada pedagang non muslim yang membawa barang dagangannya kedalam negara muslim setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang menjadi dewan *syuronya* (Djazuli, 2013:237).

Selain itu, masyarakat melalui wakilnya yaitu pemerintah dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarahkan kepada kemakmuran

bersama. hal ini didasarkan pada firman Allah Surat Al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja di antara kamu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya harta adalah milik Allah dan diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, rakyat mempunyai hak melalui lembaga yang dimilikinya dalam peruntukan harta tersebut untuk kemaslahatan umat.

Untuk mencapai kemaslahatan umat, harus ditegakkan prinsip *siyasa* yaitu prinsip amanah, keadilan, ketaatan dan musyawarah. Semua prinsip tersebut dapat tercapai dengan pengambilan kebijakan secara musyawarah mufakat.

Selain ayat diatas, firman Allah tentang mengelola keuangan yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki diantara kamu, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan,

kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus dicatat baik besar maupun kecil, dan dalam segala bentuk transaksi baik tunai ataupun utang dicatat serta harus ada dua atau tiga orang saksi sebagai pengingat dan memperkuat pencatatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan terhindar dari segala perbuatan fitnah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut Wirartha (2006:39) adalah sebagai berikut: "Objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit observasi atau individu yang berbeda. Atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai."

Objek penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah pengelolaan keuangan daerah (X) dan kinerja aparatur pemerintah daerah (Y). Penelitian ini dilaksanakan pada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan selaku aparatur yang mengelola keuangan dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyajian laporan keuangannya.

3.2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diinginkan.

Menurut Sugiyono (2007:1) definisi Metode Penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah."

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang dikutip dari Sugiyono (2014:14) :

“Metode Penelitian Kuantitatif yaitu menurut data penelitiannya, adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran contoh suatu pernyataan atau pertanyaan yang memerlukan alternative jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dimana masing-masing pilihan jawaban diberi skor misanya sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, kurang setuju 2 dan tidak setuju ”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Asosiatif. Dengan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga memperjelas gambaran mengenai objek yang akan kita teliti.

Definisi metode penelitian deskriptif dalam buku Anggara (2015 : 21) menyatakan bahwa :“Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya”.

Sedangkan metode asosiatif menurut David Kline dalam Sugiyono (2016:11) “sebuah penelitian menurut tingkat eksplansinya nya termasuk kedalam penelitian asosiatif yaitu tingkat penjelasan. Jadi, penelitian menurut tingkat eksplansinya adalah penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variable X terhadap Y yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. .

Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, peneliti harus menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

Adapun pengertian dari operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2007:31), adalah: “Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk kejelasan mengetahui pengukuran variabel-variabel penelitian. Penulis mengemukakan dua variabel yang akan diteliti.

1. Variabel Bebas / *Independent* (variable X)

Sugiyono (2011:39) menyatakan bahwa :“Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan.

2. Variabel Terikat / *Dependen* (Variabel Y)

Variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi / respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Menurut Sugiyono (2011:39)

menyatakan bahwa : “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.” Dalam hal ini variabel terikatnya adalah Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengelolaan Keuangan Chabib dan Rohcmansjah (2010:10)	Akuntabilitas	1. Dapat dipertanggungjawabkan	Likert	1
		2. Kesesuaian dengan SAP No. 71 thn 2010	Likert	2
		3. Kewajiban telah dipenuhi	Likert	3
		4. Sesuai dengan RAPBD	Likert	4
		5. Pengungkapan dalam laporan keuangan	Likert	5
	<i>Value For Money</i>	1. Kualitas	Likert	6
		2. Efektif	Likert	7
		3. Efesien	Likert	8
		4. Sesuai sasaran	Likert	9
		5. Sesuai dengan standar	Likert	10
	Kejujuran	1. Menjunjung kejujuran	Likert	11
		2. Berintegritas tinggi	Likert	12
		3. Patuh terhadap hukum dan peraturan	Likert	13
		4. Menghindari penyalahgunaan anggaran	Likert	14
		5. Kesesuaian jabatan dan wewenang	Likert	15
	Transparansi	1. Keterbukaan informasi keuangan	Likert	16
		2. Responsive	Likert	17

		3. Pernyataan yang jelas tentang anggaran, sasaran, dan hasil yang dicapai	Likert	18	
		4. Kemudahan informasi keuangan	Likert	19	
		5. Tersedianya akses informasi	Likert	20	
	Pengendalian	1. Pengawasan anggaran secara preventif	Likert	21	
		2. Pengawasan anggaran secara represif	Likert	22	
		3. Prosedur yang dilakukan dengan baik	Likert	23	
		4. Pengkoordinasian	Likert	24	
		5. Evaluasi	Likert	25	
	Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Mahsun (2006:77),	Masukan	1. Dana	Likert	26
			2. SDM	Likert	27
3. Waktu			Likert	28	
4. Sarana			Likert	29	
5. Tujuan			Likert	30	
Proses		1. Kecepatan	Likert	31	
		2. Ketepatan	Likert	32	
Keluaran		1. Program / kegiatan	Likert	33	
Hasil		1. Tingkat Keberhasilan	Likert	34	
Manfaat		1. Bermanfaat untuk masyarakat	Likert	35	
		2. Bermanfaat untuk pemerintah	Likert	36	
Dampak		1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Likert	37	
		2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Likert	38	

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. “Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek / subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subjek / objek itu” (Sugiyono, 2013).

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi yang akan diambil adalah staff ahli keuangan di 29 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat Bidang Keuangan dan terdapat 85 populasi.

Tabel 3.2

Daftar SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	4
2	Sekretariat DPRD	2
3	Inspektorat	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
7	Dinas Pendidikan	6

8	Dinas Kesehatan	6
9	Dinas Sosial	4
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
11	Dinas Perumahan dan Pemukiman	2
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3
14	Dinas Perhubungan	2
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
16	Dinas Lingkungan Hidup	2
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
19	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3
25	Dinas Perikanan dan Peternakan	3
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3
	Jumlah	85

Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(2017)

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. “Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan “sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel”. (Sugiyono, 2014 : 96).

Berdasarkan jumlah populasi yang akan menjadi responden adalah bagian keuangan di 29 SKPD Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 85 responden, jadi jumlah sampel yang digunakan pun sebanyak 85 responden.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan sebuah data yaitu menggunakan 2 cara sebagai berikut :

1. Angket atau Kuesioner

Angket atau juga disebut dengan Kuesioner. Menurut Anggara (2015 : 116) angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Secara umum, angket merupakan daftar pertanyaan yang jawabannya berupa satuan unit data penelitian yang diperlukan. Data ini merupakan indikator dari variabel serta dimensi –dimensi terukur dari konsep yang ditangkap melalui pertanyaan yang diajukan kepada sumber data (responden). Jawaban atas pertanyaan merupakan data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Menurut Sedarmayanti dalam buku Anggara (2015 : 121)

menyatakan bahwa :

“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.”

Dalam penelitian yang penulis teliti teknik pengumpulan dokumentasinya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.6. Instrumen Penelitian

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”. (Sugiyono, 2014: 119). Dengan demikian, penggunaan instrument penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah atau fenomena. Instrument dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala *likert*. Sugiyono (2014 : 107) menyatakan bahwa “Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor.

Untuk pertanyaan yang positif maka pemberian skor sebagai berikut:

S : Sedang

T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

3.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam sebuah penelitian diharuskannya sebuah valid dan reliabelnya sebuah data / instrumen. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (menukur) itu valid. “Valid artinya instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Sedangkan instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”(Sugiyono, 2014:137).

3.7.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:3) “Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.”

Berdasarkan defenisi diatas, maka validitas diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran (kuesioner).Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total =0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan apabila $< 0,30$ berarti data tersebut dapat dikatakan tidak valid.

Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam kuesioner. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product moment*. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 20*.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Pengertian reliabilitas menurut Sugiyono (2009:3) adalah “Derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.”

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relative sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.

Setiap alat ukur seharusnya memeberikan kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Semakin tinggi reliabilitas menunjukkan kesalahan pengukuran semakin kecil dan begitupun sebaliknya,

semakin besar kesalahan pengukuran, semakin menunjukkan ketidakandalan alat ukur tersebut. Tinggi rendahnya reabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.

Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala likert 1-5) adalah *cronbach alpha*. Uji realibilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak menggunakan batas 0,6. Menurut Sekaran, reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran, 2011 : 93). Mencari realibilitas dapat digunakan rumus *cronbach alpha* untuk mengetahui konsistensi alat ukur, untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian reabilitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 20*.

3.8. Analisis Data Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2011:260) analisis *regresi linier berganda* digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2007:325) yaitu :

“Garis regresi (*regression line/line of the best fit/estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (scatter diagram) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).”

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh pengelolaan keuangan daerah

terhadap kinerja pemerintah daerah. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Y) dan variabel independen Akuntabilitas(X_1), *Value for Money* (X_2), Kejujuran (X_3), Transparansi (X_4), dan Pengendalian (X_5). Dimana untuk menganalisis regresi linear berganda peneliti menggunakan SPSS.

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Sumber: Sugiyono (2010: 277)

Dimana:

Y	= Variabel tak bebas (kinerja pemerintah daerah)
a	= Bilangan berkonstanta
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= Koefisien arah garis
X_1	= Variabel bebas (Akuntabilitas)
X_2	= Variabel bebas (<i>Value for Money</i>)
X_3	= Variabel bebas (Kejujuran)
X_4	= Variabel bebas (Transparansi)
X_5	= Variabel bebas (Pengendalian)
e	= Faktor pengganggu diluar model

3.9. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (sugiyono, 2014 : 70).

Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus di uji. Pengujian ini membuktikan H_0 atau H_a yang akan diterima. Jika H_a diterima maka H_0 ditolak.

3.9.1. Uji Parsial (t-test)

Menurut Sugiyono (2011 : 215) Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (bebas) secara parsial terhadap variabel dependen (terikat) yang dilihat dari perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai kesalahan (α). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 % atau 0,05. Dikatakan signifikan apabila nilai $< \alpha = 0,05$. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian uji t dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 20*.

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji T adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas (x_1), *value for money* (x_2), kejujuran (x_3), transparansi (x_4), dan pengendalian (x_5) tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah.

- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas (x_1), *value for money* (x_2), kejujuran (x_3), transparansi (x_4), dan pengendalian (x_5) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparaturpemerintah daerah.

3.9.2. Uji Simultan (F-test)

Menurut Sugiyono (2011 : 257), Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yang dilihat dari perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai kesalahan (α). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian uji F dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 20*.

Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikan (α) dengan ketentuan :

$\alpha < 5\%$: H_a diterima, berarti proporsi akuntabilitas (x_1) , *value for money* (x_2), kejujuran (x_3), transparansi (x_4), dan pengendalian (x_5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah.

$\alpha > 5\%$: H_a ditolak. Berarti proporsi akuntabilitas (x_1) , *value for money* (x_2), kejujuran (x_3), transparansi (x_4), dan pengendalian (x_5) secara

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

3.10. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Silalahi (2012 ; 376), Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). perhitungan dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi *product moment pearson* dan dilakukan dengan 100%. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

100% = Pengali yang menyatakan dalam persentase

Dimana apabila :

Kd = 0, Berati pengaruh variabel x terhadap variabel y, lemah

Kd = 1, Berati pengaruh variabel x terhadap variabel y, kuat

Pada tabel berikut ini adalah gambaran koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi**

$0 \% \leq KD \leq 100$	Tingkatan Hubungan
81 % - 100 %	Sangat Tinggi
49 % - 80 %	Tinggi
17 % - 48 %	Cukup Tinggi
5% - 16 %	Rendah tapi pasti
0% - 4 %	Rendah / lemah sekali

Sumber : Sugiyono : (2012 : 183)

3.11. Tempat Penelitian

Penulis melakukan tempat penelitian di wilayah Kabupaten Bandung Barat beralamat di Jl. Padalarang – Cisarua Km 2 Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 40552.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

4.1.1. Sejarah Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun 1999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan /dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembangan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi (yang meliputi 3 Kecamatan) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM²) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman

Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa

Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM², terletak antara 60° 41' s/d 70° 19' lintang Selatan dan 107° 22' s/d 108° 05' Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : berbatasan dengan kabupaten Cianjur
- b. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari : Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga.

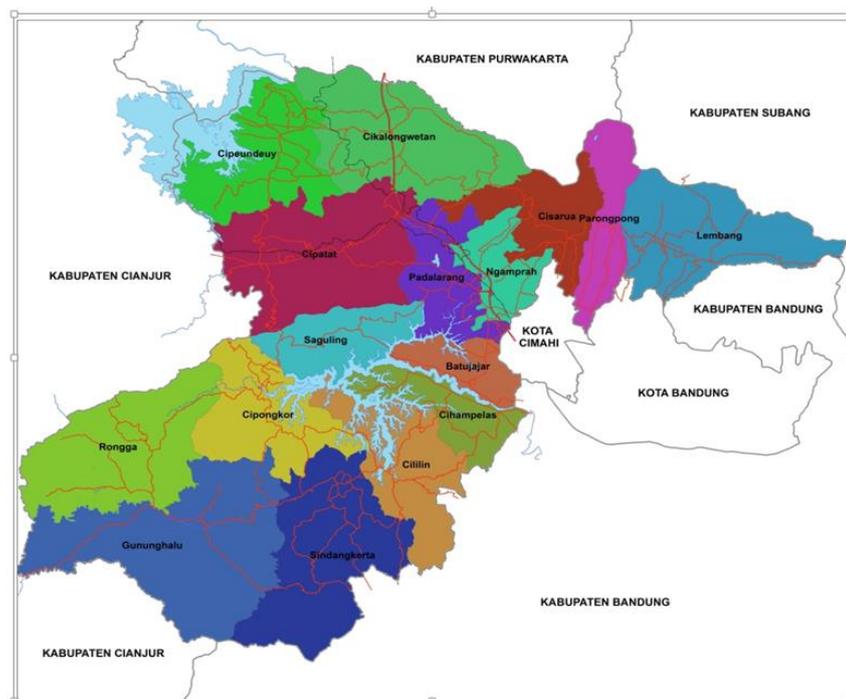
Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 HA, budidaya non peratanian seluas 12.159,151 HA dan lainnya seluas 1.768,654 HA.

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam.

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta); Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;
- b. Timur : Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);
- c. Selatan : Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);

- d. Barat : Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).



Gambar 4.1

Pembagian Wilayah Kabupaten Bandung Barat

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

VISI

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH”.

Visi tersebut mengandung arti :

- 1) Cerdas : Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus:
 - a. Memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan menguasai informasi.
 - b. Produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif.
 - c. Jujur, beretika dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial.
- 2) Rasional : Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur;
- 3) Maju : Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju, bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan;
- 4) Agamis : Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Sehat : Mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;

- 6) Pengembangan Potensi Wilayah :Merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 7) Pemberdayaan Potensi Wilayah :Merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan,serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan social

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal.
6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.

4.1.4. Arti Lambang Kabupaten Bandung Barat



Gambar 4.2

Lambang Kabupaten Bandung Barat

1. Bintang Segilima dan Peneropong Bintang Bosscha



Berwarna Kuning

Melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah masyarakat dengan kehidupan yang Agamis (Religius) dan Peneropongan Bintang sebagai simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan merupakan ciri atau identitas yang khas dari Kabupaten Bandung Barat.

2. Simbol Industri Berwarna Hijau Dengan Latar Belakang



Berwarna Merah

Melambangkan wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah kawasan industri yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sangat potensial dan strategis untuk mendukung agro industri yang ramah lingkungan.

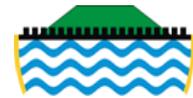
3. Pohon Pisang Dengan 2 (Dua) Pelepah Daun Warna Hijau Dan 1 (Satu) Bunga Melati Warna Putih Dengan Latar Belakang



Berwarna Merah

Menggambarkan tanggal 2 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat dan melambangkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi lahan pertanian, perkebunan, hasil bunga yang sangat potensial untuk pengembangan agro wisata dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Bendungan Bergerigi 19 Buah Berwarna Hitam Dan Gelombang Warna Biru Dan Warna Putih Berjumlah 6 Buah Dan Gunung Berwarna Hijau



Menggambarkan bahwa pada tanggal 19 bulan Juni adalah peresmian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan melambangkan bahwa di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber air, danau dan bendungan yang berfungsi sebagai lahan perikanan serta sumber pembangkit tenaga listrik, adapun pegunungan merupakan kawasan konservasi dan wisata alam.

5. Mangkuk Berwarna Hitam



Melambangkan bahwa daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam dan lahan pertambangan yang besar, seperti Batu Gamping, Andesit, Marmer dan Pasir.

6. Perisai atau disebut juga Garda



Artinya alat pelindung yang memberikan rasa aman dari ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar sehingga tercipta suasana tenang, damai dan kondusif.

7. Jantung



Jantung Merupakan alat pemompa, pengatur dalam menjalankan aktifitas sehingga dapat mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

8. Pita Label



Label yang berbentuk pita yang merupakan nilai yang dimiliki sebagai perwujudan identitas diri sehingga dapat memberikan satu gambaran yang jelas terhadap kondisi objektif

4.2. Analisis Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi identitas diri yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, masa / lamanya bekerja, dan dinas/instansi. Hasil analisis dari keenam identitas diri tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut :

1. Jenis Kelamin

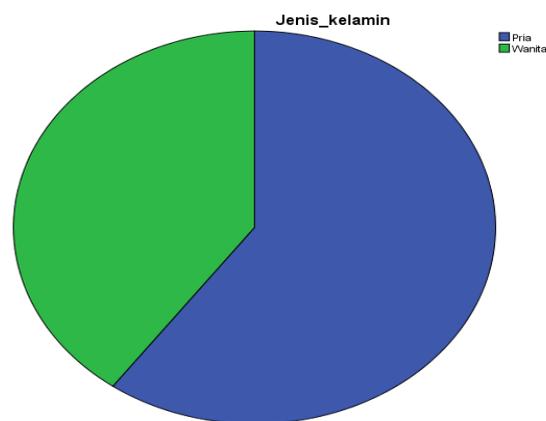
Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan jenis kelamin pegawai pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	Pria	51	60.0
	Wanita	34	40.0
	Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai dengan jenis kelamin pria sebanyak 51 responden (60%), sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 34 (40%). Untuk lebih jelasnya beriku gambar diagram yang menunjukkan jenis kelamin responden yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Usia

Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan usia pegawai pada bagian keuangan peemrintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

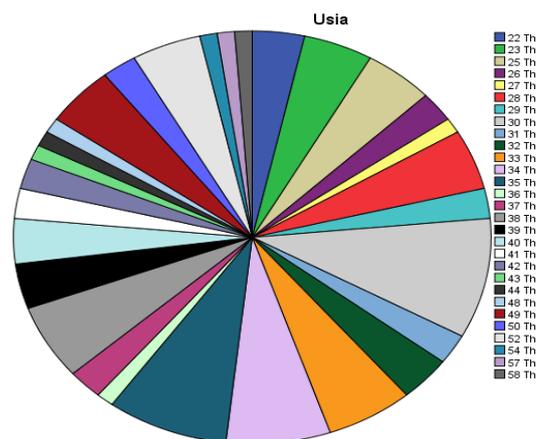
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent
22 Th	3	3.5
23 Th	4	4.7
25 Th	4	4.7
26 Th	2	2.4
27 Th	1	1.2
28 Th	4	4.7
Valid 29 Th	2	2.4
30 Th	8	9.4
31 Th	2	2.4
32 Th	3	3.5
33 Th	5	5.9

34 Th	6	7.1
35 Th	7	8.2
36 Th	1	1.2
37 Th	2	2.4
38 Th	5	5.9
39 Th	3	3.5
40 Th	3	3.5
41 Th	2	2.4
42 Th	2	2.4
43 Th	1	1.2
44 Th	1	1.2
48 Th	1	1.2
49 Th	4	4.7
50 Th	2	2.4
52 Th	4	4.7
54 Th	1	1.2
57 Th	1	1.2
58 Th	1	1.2
Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai yang berusia 30 tahun berjumlah 8 orang dan usia 35 tahun sebanyak 7. Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang menunjukkan usia responden yang peneliti peroleh.



Gambar 4.4
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

3. Pendidikan Terakhir

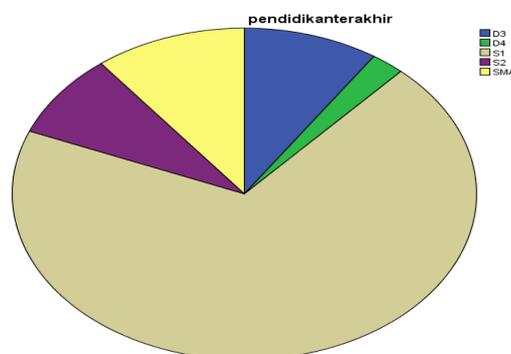
Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan pendidikan terakhir pegawai pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent
D3	8	9.4
D4	2	2.4
Valid S1	59	69.4
S2	7	8.2
SMA	9	10.6
Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 59 orang (69,4). Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang menunjukkan pendidikan terakhir responden yang peneliti peroleh.



Gambar 4.5
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

4. Jabatan

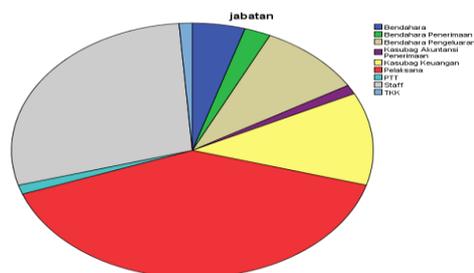
Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan jabatan pegawai pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

	Frequency	Percent
Bendahara	4	4.7
Bendahara Penerimaan	2	2.4
Bendahara Pengeluaran	8	9.4
Kasubag Akuntansi Penerimaan	1	1.2
Valid Kasubag Keuangan	10	11.8
Pelaksana	34	40.0
PTT	1	1.2
Staff	24	28.2
TKK	1	1.2
Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai dengan jabatan sebagai pelaksana sebanyak 34 orang (40%). Untuk lebih jelasnya berikut diagram yang menunjukkan jabatan respondenn yang peneliti peroleh.



Gambar 4.6
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

5. Masa / Lama Kerja

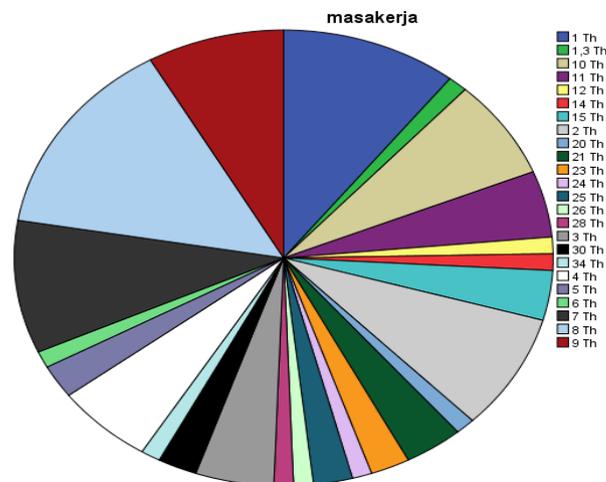
Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan masa / lama kerja pegawai pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa/Lama Kerja

	Frequency	Percent
1 Th	9	10.6
1,3 Th	1	1.2
10 Th	6	7.1
11 Th	4	4.7
12 Th	1	1.2
14 Th	1	1.2
15 Th	3	3.5
2 Th	7	8.2
20 Th	1	1.2
21 Th	3	3.5
23 Th	2	2.4
24 Th	1	1.2
Valid 25 Th	2	2.4
26 Th	1	1.2
28 Th	1	1.2
3 Th	4	4.7
30 Th	2	2.4
34 Th	1	1.2
4 Th	5	5.9
5 Th	2	2.4
6 Th	1	1.2
7 Th	8	9.4
8 Th	12	14.1
9 Th	7	8.2
Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai dengan masa kerja selama 8 tahun sebanyak 12 pegawai dari 85 pegawai (14,1%). Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang menunjukkan lama kerja responden yang peneliti peroleh.



Gambar 4.7
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

6. Dinas atau Instansi

Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan dinas / instansi pegawai pada bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat di tunjukkan pada tabel berikut :

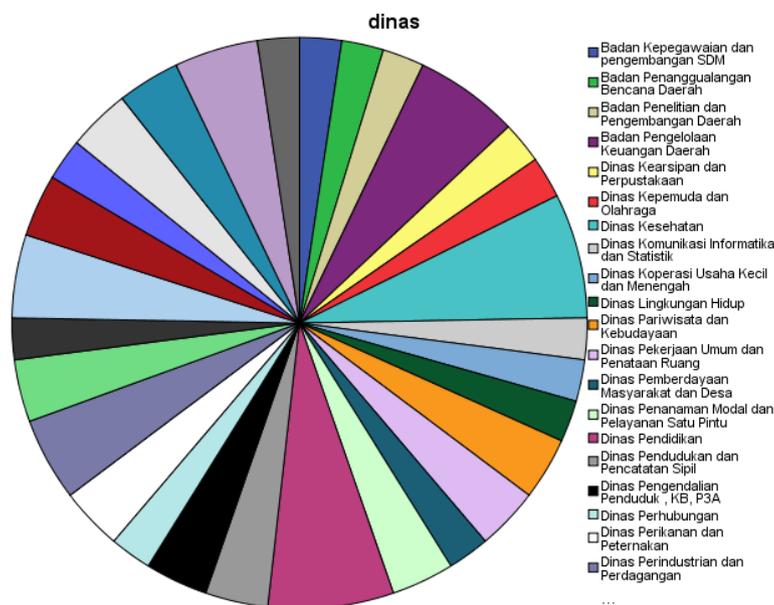
Tabel 4.6
Karateristik Responden Berdasarkan Dinas / Instansi

	Frequency	Percent
Valid	Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM	2.4
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.4
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.4
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.9
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.4
	Dinas Kepemuda dan Olahraga	2.4
	Dinas Kesehatan	7.1
	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	2.4
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.4
	Dinas Lingkungan Hidup	2.4
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.5
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.5
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.4
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.5
	Dinas Pendidikan	7.1
	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	3.5
	Dinas Pengendalian Penduduk , KB, P3A	3.5
	Dinas Perhubungan	2.4
	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.5
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.7

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	3.5
Dinas Perumahan dan Permukiman	2	2.4
Dinas Sosial	4	4.7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3.5
Inspektorat Daerah	2	2.4
Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3.5
Satpol PP dan Damkar	3	3.5
Sekretariat Daerah	4	4.7
Sekretariat DPRD	2	2.4
Total	85	100.0

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada bagian keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah pegawai di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dengan masing-masing pegawai sebanyak 6 pegawai (7,1%) dari 29 Dinas. Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang menunjukkan dinas atau instansi responden yang peneliti peroleh.



Gambar 4.8
Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Dinas / Instansi

4.3. Teknik Analisis Data

Langkah untuk mengetahui kondisi variable pengaruh pengelolaan kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai lima kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Selanjutnya dicari rata-rata dari nilai yang telah diperoleh dari jawaban responden. Dalam penelitian ini, penulis menentukan banyaknya interval sebesar lima kelas. Adapun rumus yang digunakan menurut Sudjana (2002 : 47) adalah sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Keterangan :

$$\text{Rentang} = \text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}$$

$$\text{Banyak Kelas Interval} = 5$$

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah :

$$\begin{aligned} \text{Panjang Kelas Interval} &= \frac{5 - 1}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Jadi, interval dari kriteria penilaian variable adalah sebagai berikut :

$$1,00 - 1,79 = \text{Sangat Rendah}$$

$$1,80 - 2,59 = \text{Rendah}$$

$$2,60 - 3,39 = \text{Sedang}$$

$$3,40 - 4,19 = \text{Tinggi}$$

$$4,20 - 5,00 = \text{Sangat Tinggi}$$

4.3.1. Tanggapan Responden terhadap Pengelolaan Keuangan

1. Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Akuntabilitas

Untuk mengetahui tanggapan responden pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari dimensi akuntabilitas, dalam penelitian ini skor untuk dimensi akuntabilitas diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi akuntabilitas terdiri dari lima indikator : 1) Dapat dipertanggungjawabkan, 2) sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010, 3) Kewajiban telah dipenuhi, 4) Sesuai dengan RAPBD, 5) Mengungkapkan hasil laporan. Dimensi akuntabilitas dioperasionalkan kedalam lima item pernyataan dengan masing-masing satu indikator dengan jawaban dari 85 responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Tanggapan responden mengenai dimensi akuntabilitas N = 85

No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
1	16	50	7	10	2	323	3.8	Tinggi
2	26	55	4	0	0	362	4.59	Sangat Tinggi
3	23	59	3	0	0	360	4.235	Sangat Tinggi
4	30	53	2	0	0	368	4.329	Sangat Tinggi
5	25	54	3	3	0	356	4.188	Tinggi
Jumlah	120	271	19	13	2	1769	4.228	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai dimensi akuntabilitas bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator pertama tentang dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,8 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator kedua tentang sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010 dengan nilai rata-rata sebesar 4,59.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST) dari lima item pernyataan yang termasuk kedalam dimensi akuntabilitas, dapat dilihat sebagai berikut :

Nilai indeks minimum= Skor min x Jumlah pernyataan x Jumlah responden

$$= 1 \times 5 \times 85$$

$$= 425$$

Nilai indeks maksimal=Skor maks x Jumlah pernyataan x Jumlah responden

$$= 5 \times 5 \times 85$$

$$= 2125$$

Interval = Skor indeks maks – Skor indeks min

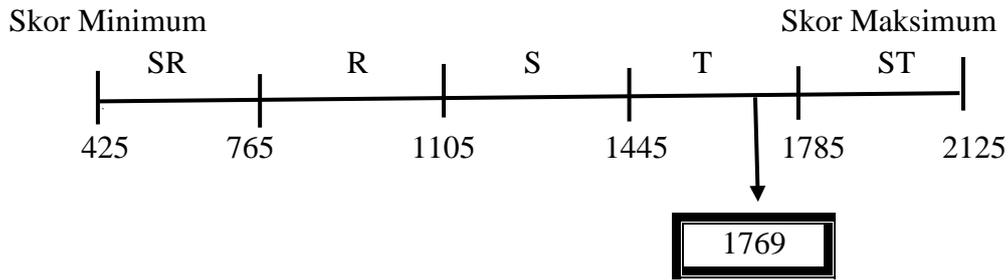
$$= 2125 - 425$$

$$= 1700$$

Jarak Interval = $\frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang}}$

$$= \frac{1700}{5}$$

$$= 34$$



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa dimensi akuntabilitas memperoleh nilai sebesar 1769 yang terletak diantara rentang 1445-1785, dengan demikian berada pada garis yang berkategori tinggi.

2. Tanggapan Responden Mengenai Dimensi *Value For Money*

Untuk mengetahui tanggapan responden pengelolaan keuangan yang dilakukan aparaturn pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari dimensi *value for money*, dalam penelitian ini skor untuk dimensi *value for money* diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi *value for money* terdiri dari lima indikator : 1) Kualitas, 2) Efektif, 3) Efisien, 4) Sesuai dengan sasaran, 5) Sesuai dengan standar. Dimensi *value for money* dioperasionalkan kedalam lima item pernyataan dengan masing-masing satu indikator dengan jawaban dari 85 responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8

Tanggapan responden mengenai dimensi *value for money* N=85

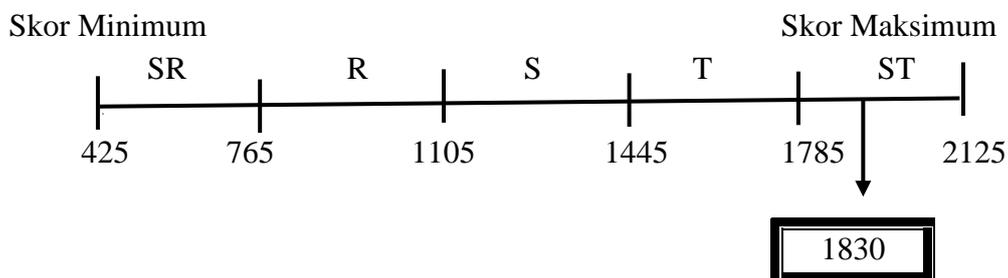
No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
6	23	59	3	0	0	360	4.235	Sangat Tinggi
7	35	44	5	0	1	367	4.318	Sangat Tinggi
8	31	50	4	0	0	367	4.318	Sangat Tinggi
9	25	57	2	1	0	361	4.247	Sangat Tinggi

10	37	46	2	0	0	375	4.412	Sangat Tinggi
Jumlah	151	256	16	1	1	1830	4.306	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai dimensi *value for money* bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator pertama tentang kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 4,23 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator kelima tentang sesuai dengan standar biaya yang telah ditentukan dengan nilai rata-rata sebesar 4,41.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) dari dimensi *value for money*, dapat dilihat dengan rumus yang sama dengan tanggapan dimensi sebelumnya karena memiliki ciri yang sama yaitu 5 pernyataan, skor min 1, skor maks 5, dan 85 responden maka hasil intervalnya sama yaitu sebesar 340, jadi untuk melihat garis kontinum yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST) dari lima item pernyataan yang termasuk kedalam dimensi *value for money* sebagai berikut :



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 dan garis interval di atas dapat diketahui bahwa dimensi *value for money* memperoleh nilai sebesar

1830 yang terletak diantara rentang 1785 – 2125, dengan demikian berada pada garis yang berkategori sangat tinggi.

3. Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Kejujuran

Untuk mengetahui tanggapan responden pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari dimensi kejujuran, dalam penelitian ini skor untuk dimensi kejujuran diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi kejujuran terdiri dari lima indikator : 1) Menjunjung kejujuran, 2) Berintegritas tinggi , 3) Patuh terhadap hukum dan peraturan, 4) Menghindari penyalahgunaan anggaran 5) Kesesuaian jabatan dan wewenang. Dimensi kejujuran dioperasionalkan kedalam lima item pernyataan dengan masing-masing satu indikator dengan jawaban dari 85 responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Tanggapan responden mengenai dimensi kejujuran N=85

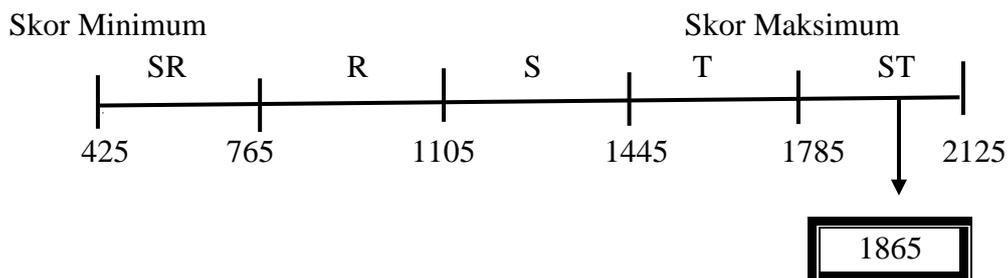
No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
11	42	43	0	0	0	382	4.494	Sangat Tinggi
12	28	56	1	0	0	367	4.318	Sangat Tinggi
13	30	54	1	0	0	369	4.341	Sangat Tinggi
14	42	43	0	0	0	382	4.494	Sangat Tinggi
15	28	55	1	1	0	365	4.294	Sangat Tinggi
Jumlah	170	251	3	1	0	1865	4.388	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai dimensi kejujuran bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator kelima tentang kesesuaian jabatan dan wewenang dengan nilai rata-rata sebesar 4,29 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator pertama tentang menjunjung

kejujuran dan indikator keempat tentang menghindari pentalahgunaan anggaran dengan masing-masing mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 4,49.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) dari dimensi kejujuran, dapat dilihat dengan rumus yang sama dengan tanggapan dimensi sebelumnya karena memiliki ciri yang sama yaitu 5 pernyataan, skor min 1, skor maks 5, dan 85 responden maka hasil intervalnya sama yaitu sebsar 340, jadi untuk melihat garis kontinum yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST) dari lima item pernyataan yang termasuk kedalam dimensi kejujuran sebagai berikut :



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa dimensi kejujuran memperoleh nilai sebesar 1865 yang terletak diantara rentang 1785 – 2125, dengan demikian berada pada garis yang berkategori sangat tinggi..

4. Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Transparansi

Untuk mengetahui tanggapan responden pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari dimensi transparansi, dalam penelitian ini skor untuk dimensi transparansi diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi transparansi terdiri dari lima indikator : 1) Keterbukaan informasi keuangan, 2) Responsive, 3)

Pernyataan yang jelas tentang anggaran, sasaran dan hasil yang dicapai, 4) Kemudahan informasi keuangan, 5) Tersedianya akses informasi. Dimensi transparansi dioperasionalkan kedalam lima item pernyataan dengan masing-masing satu indikator dengan jawaban dari 85 responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Tanggapan responden mengenai dimensi transparansi N=85

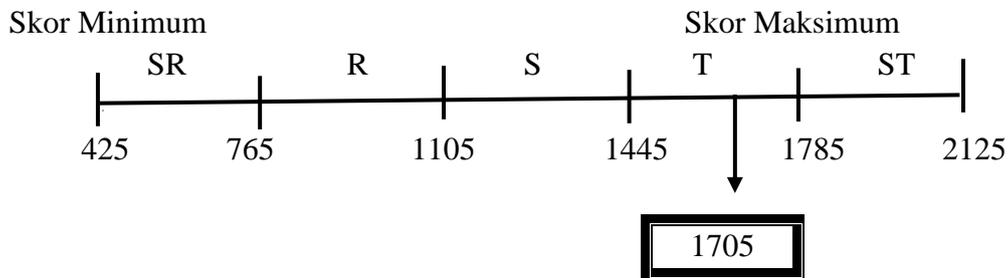
No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
16	15	54	12	3	1	334	3.929	Tinggi
17	25	50	10	0	0	355	4.176	Tinggi
18	14	53	15	3	0	333	3.918	Tinggi
19	15	58	9	3	0	340	4	Tinggi
20	15	61	6	3	0	343	4.035	Tinggi
Jumlah	84	276	52	12	1	1705	4.012	Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai dimensi transparansi bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator ketiga tentang pernyataan yang jelas tentang anggaran, sasaran dan hasil yang dicapai dengan nilai rata-rata sebesar 3,91 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator kedua tentang responsif dengan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) dari dimensi transparansi, dapat dilihat dengan rumus yang sama dengan tanggapan dimensi sebelumnya karena memiliki ciri yang sama yaitu 5 pernyataan, skor min 1, skor maks 5, dan 85 responden maka hasil intervalnya sama yaitu sebesar 340, jadi untuk melihat garis kontinum yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR),

Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST) dari lima item pernyataan yang termasuk kedalam dimensi transparansi sebagai berikut :



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.10 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa dimensi transparansi memperoleh nilai sebesar 1705 yang terletak diantara rentang 1445 – 1785, dengan demikian berada pada garis yang berkategori tinggi.

5. Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Pengendalian

Untuk mengetahui tanggapan responden pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari dimensi pengendalian, dalam penelitian ini skor untuk dimensi pengendalian diperoleh dari hasil tanggapan responden. Dimensi pengendalian terdiri dari lima indikator : 1) Pengawasan anggaran secara preventif, 2) Pengawasan anggaran secara represif, 3) Prosedur yang dilakukan dengan baik, 4) Pengkoordinasian, 5) Evaluasi. Dimensi pengendalian dioperasionalkan kedalam lima item pernyataan dengan masing-masing satu indikator dengan jawaban dari 85 responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

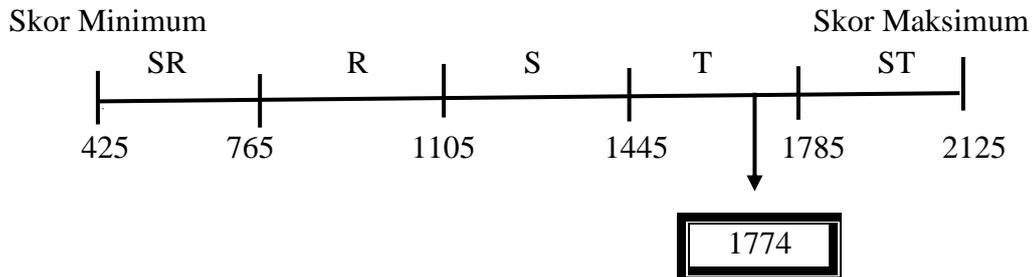
Tabel 4.11
Tanggapan responden mengenai dimensi pengendalian N = 85

No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
21	20	56	8	1	0	350	4.118	Tinggi
22	20	55	8	1	1	347	4.082	Tinggi
23	29	53	3	0	0	366	4.306	Sangat Tinggi
24	22	54	8	0	1	351	4.129	Tinggi
25	25	56	3	1	0	360	4.235	Sangat Tinggi
Jumlah	116	274	30	3	2	1774	4.174	Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai dimensi pengendalian bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator yang ke dua tentang Pengawasan anggaran secara represif dengan nilai rata-rata sebesar 4,08 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator ketiga tentang Prosedur yang dilakukan dengan baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,3.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) dari dimensi pengendalian, dapat dilihat dengan rumus yang sama dengan tanggapan dimensi sebelumnya karena memiliki ciri yang sama yaitu 5 pernyataan, skor min 1, skor maks 5, dan 85 responden maka hasil intervalnya sama yaitu sebsar 340, jadi untuk melihat garis kontinum yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST) dari lima item pernyataan yang termasuk kedalam dimensi pengendalian sebagai berikut :



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.11 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa dimensi pengendalian memperoleh nilai sebesar 1774 yang terletak diantara rentang 1445 – 1785, dengan demikian berada pada garis yang berkategori tinggi.

6. Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Adapun setelah mengetahui nilai dari kelima dimensi, nilai-nilai dari setiap indikator diakumulasikan untuk nilai keseluruhan dari tanggapan responden terhadap kelima dimensi seperti pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
1	16	50	7	10	2	323	3.8	Tinggi
2	26	55	4	0	0	362	4.59	Sangat Tinggi
3	23	59	3	0	0	360	4.24	Sangat Tinggi
4	30	53	2	0	0	368	4.33	Sangat Tinggi
5	25	54	3	3	0	356	4.19	Tinggi
6	23	59	3	0	0	360	4.24	Sangat Tinggi
7	35	44	5	0	1	367	4.32	Sangat Tinggi
8	31	50	4	0	0	367	4.32	Sangat Tinggi
9	25	57	2	1	0	361	4.25	Sangat Tinggi
10	37	46	2	0	0	375	4.41	Sangat Tinggi
11	42	43	0	0	0	382	4.49	Sangat Tinggi
12	28	56	1	0	0	367	4.32	Sangat Tinggi
13	30	54	1	0	0	369	4.34	Sangat Tinggi
14	42	43	0	0	0	382	4.49	Sangat Tinggi
15	28	55	1	1	0	365	4.29	Sangat Tinggi

16	15	54	12	3	1	334	3.93	Tinggi
17	25	50	10	0	0	355	4.18	Tinggi
18	14	53	15	3	0	333	3.92	Tinggi
19	15	58	9	3	0	340	4	Tinggi
20	15	61	6	3	0	343	4.04	Tinggi
21	20	56	8	1	0	350	4.12	Tinggi
22	20	55	8	1	1	347	4.08	Tinggi
23	29	53	3	0	0	366	4.31	Sangat Tinggi
24	22	54	8	0	1	351	4.13	Tinggi
25	25	56	3	1	0	360	4.24	Sangat Tinggi
Jumlah	641	1328	120	30	6	8943	4.22	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil akumulasi tanggapan responden mengenai pengelolaan keuangan bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada indikator pertama tentang dapat dipertanggung jawabkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,8 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada indikator kedua tentang sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010 dengan nilai rata-rata sebesar 4,59.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan skor rata-rata 4.22.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST) untuk dua puluh lima pernyataan yang termasuk kedalam variabel pengelolaan keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Nilai indeks minimum = Skor min x Jumlah pernyataan x Jumlah responden

$$= 1 \times 25 \times 85$$

$$= 2125$$

Nilai indeks maksimal = Skor maks x Jumlah pernyataan x Jumlah kresponden

$$= 5 \times 25 \times 85$$

$$= 10625$$

Interval = Skor indeks maks – Skor indeks min

$$= 10625 - 2125$$

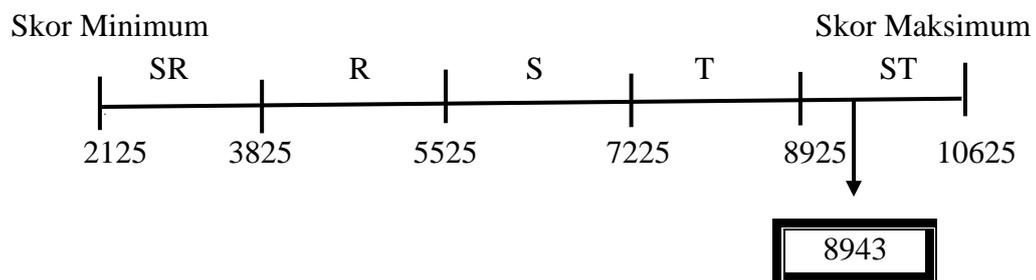
$$= 8500$$

Jarak Interval

$$= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang}}$$

$$= \frac{8500}{5}$$

$$= 1700$$



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa variabel pengelolaan keuangan memperoleh nilai sebesar 8943 yang terletak diantara 8925 dan 10625, dengan demikian berada pada garis yang berkategori sangat tinggi.

4.3.2. Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Adapun setelah mengetahui nilai dari keenam dimensi, nilai-nilai dari setiap indikator diakumulasikan untuk nilai keseluruhan dari tanggapan responden terhadap keenam dimensi seperti pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

No Item	Alternatif					Total	Rata-rata	Keterangan
	5	4	3	2	1			
26	31	49	5	0	0	366	4.31	Sangat Tinggi
27	25	57	3	0	0	362	4.26	Sangat Tinggi
28	31	47	7	0	0	364	4.28	Sangat Tinggi
29	38	45	2	0	0	376	4.42	Sangat Tinggi
30	35	40	0	0	0	375	4.41	Sangat Tinggi
31	31	49	2	3	0	363	4.27	Sangat Tinggi
32	40	43	2	0	0	378	4.45	Sangat Tinggi
33	25	55	4	1	0	359	4.22	Sangat Tinggi
34	28	51	6	0	0	362	4.26	Sangat Tinggi
35	23	57	4	1	0	357	4.2	Sangat Tinggi
36	22	58	5	0	0	357	4.2	Sangat Tinggi
37	21	59	5	0	0	356	4.19	Tinggi
38	25	50	10	0	0	355	4.18	Tinggi
Jumlah	375	660	55	5	0	4730	4.28	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil akumulasi tanggapan responden mengenai kinerja aparatur bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai terendah yaitu pada dimensi dampak dengan indikator kedua tentang meningkatkan pendapatan masyarakat pada item ke-38 dengan nilai rata-rata sebesar 4,18 sedangkan nilai tertinggi yaitu pada dimensi proses dengan indikator kedua yaitu ketepatan pada item ke-32 dengan nilai rata-rata sebesar 4,45.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan skor rata-rata 4.28.

Untuk menyajikan garis kontinum (interval) yang menunjukkan kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST) untuk tiga belas pernyataan yang termasuk kedalam variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai indeks minimum} &= \text{Skor min} \times \text{Jumlah pernyataan} \times \text{Jumlah} \\ &\text{responden} \end{aligned}$$

$$= 1 \times 13 \times 85$$

$$= 1105$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai indeks maksimal} &= \text{Skor maks} \times \text{Jumlah pernyataan} \times \text{Jumlah} \\ &\text{kkresponden} \end{aligned}$$

$$= 5 \times 13 \times 85$$

$$= 5525$$

$$\text{Interval} = \text{Skor indeks maks} - \text{Skor indeks min}$$

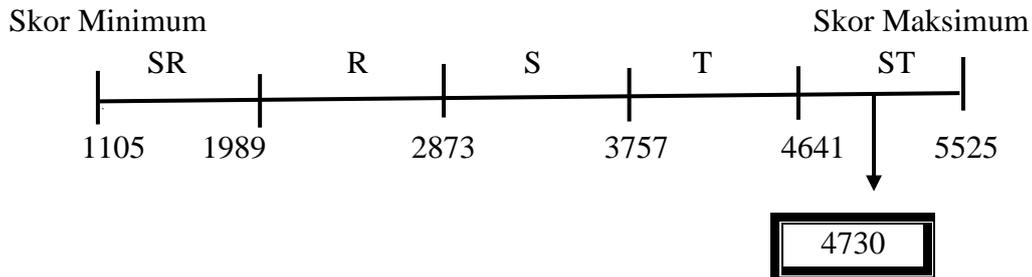
$$= 5525 - 1105$$

$$= 4420$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Interval} &= \frac{\text{Interval}}{\text{Jumlah Jenjang}} \end{aligned}$$

$$= \frac{4420}{5}$$

$$= 884$$



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 dan garis interval diatas dapat diketahui bahwa variabel kinerja pemerintah daerah memperoleh nilai sebesar 4730 yang terletak diantara 4641 dan 5525, dengan demikian berada pada garis yang berkategori sangat tinggi.

4.4. Pengujian Instrumen

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas item adalah suatu langkah untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan oleh peneliti terhadap isi dari suatu instrumen tersebut. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini pula akan menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap yang ingin diungkap. Item tersebut berupa pernyataan yang ditunjukkan kepada responden menggunakan bentuk kuesioner. Pengujian validitas item dalam SPSS bisa menggunakan tiga metode analisis, yaitu *korelasi person*, *corrected item total correlation*, dan analisis faktor.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *korelasi person*. Teknik uji validitas dengan *korelasi person*, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item pada suatu variabel. Selanjutnya pengujian signifikansi

dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,5 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung \geq r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel maka item dinyatakan tidak valid. Secara statistic, uji validitas dilakukan dengan cara teknik *product moment*. Untuk mrnguji validitas item tersebut digunakan alat bantu program *software SPSS 20 for windows* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan (Variabel X)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,378	0,3	Valid
2	0,66	0,3	Valid
3	0,655	0,3	Valid
4	0,687	0,3	Valid
5	0,728	0,3	Valid
6	0,647	0,3	Valid
7	0,641	0,3	Valid
8	0,673	0,3	Valid
9	0,665	0,3	Valid
10	0,716	0,3	Valid
11	0,620	0,3	Valid
12	0,726	0,3	Valid
13	0,590	0,3	Valid
14	0,698	0,3	Valid
15	0,718	0,3	Valid
16	0,603	0,3	Valid
17	0,714	0,3	Valid
18	0,463	0,3	Valid

19	0,633	0,3	Valid
20	0,652	0,3	Valid
21	0,532	0,3	Valid
22	0,429	0,3	Valid
23	0,473	0,3	Valid
24	0,440	0,3	Valid
25	0,590	0,3	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner melalui software SPSS 20

Tabel diatas menunjukkan bahwa instrumen dari dua puluh lima pernyataan dari variabel X (pengelolaan keuangan) pada setiap indikator yang peneliti ajukan dalam kuesioner cukup presentatif dan dapa mewakili objek yang diteliti, karena r hitung positif > r tabel.

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Variabel Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,584	0,3	Valid
2	0,686	0,3	Valid
3	0,638	0,3	Valid
4	0,651	0,3	Valid
5	0,692	0,3	Valid
6	0,479	0,3	Valid
7	0,681	0,3	Valid
8	0,740	0,3	Valid
9	0,729	0,3	Valid
10	0,760	0,3	Valid
11	0,759	0,3	Valid

12	0,790	0,3	Valid
13	0,587	0,3	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner melalui software SPSS 20

Tabel diatas menunjukkan bahwa instrument dari tiga belas pernyataan dari variable Y (kinerja aparatur pemerintah daerah) pada setiap indikator yang peneliti ajukan dalam kuesioner cukup presentatif dan dapat mewakili objek yang diteliti, karena r hitung positif $>$ r tabel.

4.4.2. Uji Realibilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, setelah dilakukan uji validitas terhadap item-item pernyataan yang dinyatakan valid, maka selanjutnya diuji keandalannya (reabilitas). Uji reabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara item-item pernyataan dalam kuesioner. Untuk menentukan apakah intrumen reliabel atau tidak menggunakan batas 0,6. Menurut Sekaran, reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran 2011 : 93). Hasil dari pengujian reabilitas terhadap intrumen pernyataan Pengelolaan Keuangan (Variabel X) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Y) dengan menggunakan bantuan program *software SPSS 20 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Realibilitas Dimensi Akuntabilitas (Variabel X1)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach'sAlpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu variabel X1 ($0,704 > 0,60$). Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel akuntabilitas X1 sebanyak 5.

Tabel 4.17

Hasil Pengujian Realibilitas Dimensi *Value For Money* (Variabel X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.833	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach'sAlpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu variabel X2 ($0,833 > 0,60$). Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel *value for money* X2 sebanyak 5.

Tabel 4.18

Hasil Pengujian Realibilitas Dimensi Kejujuran (Variabel X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.859	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach'sAlpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu variabel X3 ($0,859 > 0,60$) .Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel kejujurani X3 sebanyak 5.

Tabel 4.19

Hasil Pengujian Rabilitas Dimensi Transparansi (Variabel X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach'sAlpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu variabel X4 ($0,808 > 0,60$) .Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel transparansi X4 sebanyak 5.

Tabel 4.20

Hasil Pengujian Realibilitas Dimensi Pengendalian(Variabel X5)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.664	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach'sAlpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu

variabel X5 ($0,664 > 0,60$). Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel pengendalian X5 sebanyak 5.

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Realibilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Variabel Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.896	13

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* memiliki koefisien reabilitas keseluruhan dari tanggapan responden diatas 0,60 yaitu variabel variabel Y ($0,896 > 0,60$). Karena nilai tersebut lebih besar dari batas minimum reabilitas yang berarti secara keseluruhan kuesioner konsisten dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan *N of items* menunjukkan jumlah pernyataan dari variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (variabel Y) sebanyak tiga belas pernyataan.

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4, \text{ dan } X_5$) dengan variabel (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen yaitu pengelolaan keuangan dengan variabel dependen yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Setelah dilakukan transformasi skala pengukuran data selanjutnya dihitung data input dalam perhitungan analisis regresi. Data input dalam perhitungan analisis regresi diperoleh dari skor total akuntabilitas (X1), *value for money* (X2), kejujuran (X3), transparansi (X4), dan pengendalian (X5) serta kinerja aparatur pemerintah daerah (Y). koefisien regresi untuk model yang berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.22
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.168	3.731		1.921	.058
	Akuntabilitas	-.220	.206	-.099	-1.069	.288
	value for money	.828	.224	.372	3.693	.000
	Kejujuran	.261	.237	.108	1.102	.274
	Transparansi	.111	.162	.057	.684	.496
	Pengendalian	1.307	.193	.533	6.776	.000

a. Dependent Variable: kinerja pemda

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner melalui software SPSS 20

Dari koefisien regresi berganda yang diperoleh dapat dibentuk persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + bX5$$

$$Y = (7,168) + (-0,220X1) + (0,828X2) + (0,261X3) + (0,111X4) + (1,307X5)$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 7,168 artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam skala interval adalah 7,168 jika tidak ada variabel

akuntabilitas (X1), *value for money* (X2), kejujuran (X3), transparansi (X4) dan pengendalian (X5)

2. Koefisien regresi sebesar -0,220 artinya setiap penurunan pelaksanaan akuntabilitas tentang kinerja pemerintah daerah sebesar satu satuan dalam skala interval akan menurunkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat -0,220 satuan.
3. Koefisien regresi sebesar 0,828 artinya setiap peningkatan pelaksanaan *value for money* tentang kinerja pemerintah daerah sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat 0,828 satuan.
4. Koefisien regresi sebesar 0,261 artinya setiap peningkatan pelaksanaan kejujuran tentang kinerja pemerintah daerah sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat 0,261 satuan.
5. Koefisien regresi sebesar 0,111 artinya setiap peningkatan pelaksanaan transparansi tentang kinerja pemerintah daerah sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat 0,111 satuan.
6. Koefisien regresi sebesar 1.307 artinya setiap peningkatan pelaksanaan pengendalian tentang kinerja pemerintah daerah sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat 1.307 satuan.

7. Koefisien regresi sebesar 8,627 yang didapat dari jumlah persamaan regresi linear berganda untuk pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat artinya setiap peningkatan pelaksanaan dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian sebesar satu satuan dalam skala interval akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 8,627.

Jadi dapat disimpulkan koefisien regresi bertanda positif dari pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, pengaruh positif ini dapat diartikan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan maka kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.

4.5.2. Uji Parsial (Uji t)

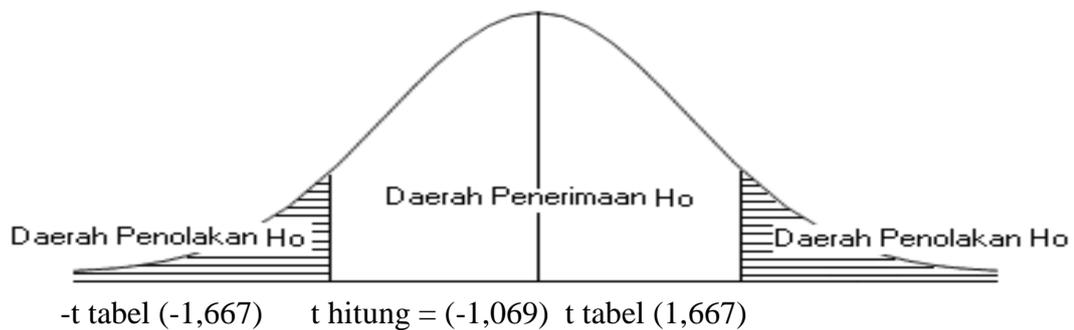
Untuk menguji hipotesis atas dengan adanya pengaruh antara variabel X (pengelolaan keuangan) terhadap variabel Y (kinerja aparatur pemerintah daerah) di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Pengaruh Dimensi Akuntabilitas (Pengelolaan Keuangan) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari dimensi akuntabilitas (pengelolaan keuangan) X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y), maka dilakukan analisis berdasarkan pada hasil regresi output yang disajikan pada tabel 4.22.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk dimensi akuntabilitas (X1) adalah $t = -1,069$. t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel yang dicari dengan $df = n-k (85-5) = 80$. Dengan taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka diketahui t tabel = 1,667.

Jadi dapat diketahui nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,069 < 1,667$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi akuntabilitas (pengelolaan keuangan) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan arah hubungan keduanya negatif, maka hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.9

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial Akuntabilitas terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,288 atau lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat

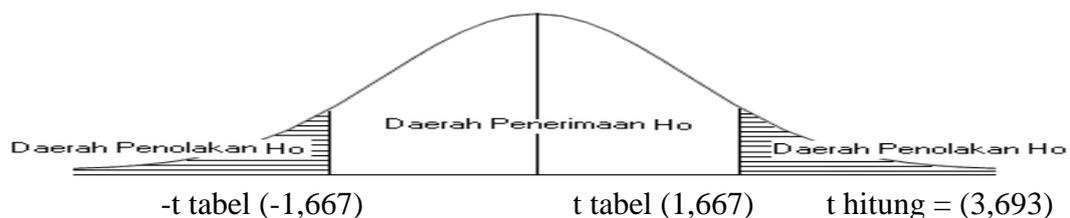
pengaruh dan tidak signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dimensi *Value For Money*(Pengelolaan Keuangan) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari dimensi *value for money* (pengelolaan keuangan) X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y), maka dilakukan analisis berdasarkan pada hasil regresi output yang disajikan pada tabel 4.22.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk dimensi *value for money* (X2) adalah $t = 3,693$. t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel yang dicari dengan $df = n-k (85-5) = 80$. Dengan taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka diketahui t tabel = 1,667.

Jadi dapat diketahui nilai t hitung $>$ t tabel ($3,693 > 1,667$) maka H_a diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara dimensi *value for money* (pengelolaan keuangan) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat..Dengan arah hubungan keduanya positif, maka hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.10

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial *Value For Money* terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa t hitung berada pada daerah penolakan H_0 yang berarti terdapat pengaruh positif antara *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah adalah signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

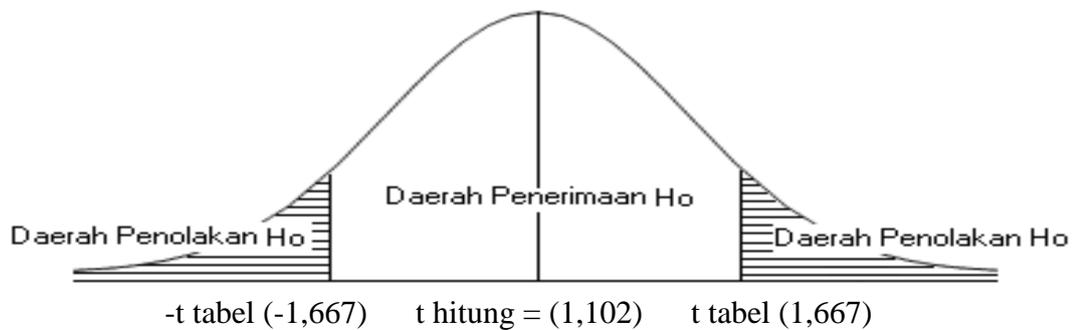
3. Pengaruh Dimensi Kejujuran (Pengelolaan Keuangan) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari dimensi kejujuran (pengelolaan keuangan) X_3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y), maka dilakukan analisis berdasarkan pada hasil regresi output yang disajikan pada tabel 4.22.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk dimensi kejujuran (X_3) adalah $t = 1,102$. t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel yang dicari dengan $df = n - k (85 - 5) = 80$. Dengan taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka diketahui t tabel = 1,667.

Jadi dapat diketahui nilai t hitung $< t$ tabel ($1,102 < 1,667$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi kejujuran (pengelolaan keuangan) terhadap kinerja aparatur pemerintah

daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan arah hubungan keduanya positif, maka hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.11

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial Kejujuran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

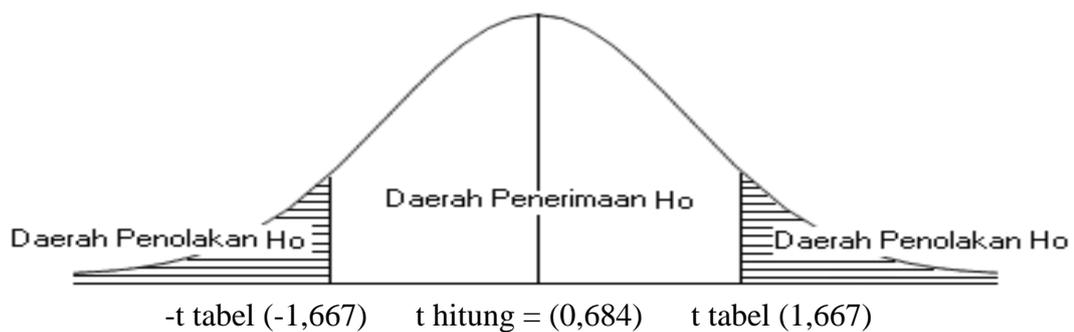
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,274 atau lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

4. Pengaruh Dimensi Transparansi (Pengelolaan Keuangan) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari dimensi transparansi (pengelolaan keuangan) X_4 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y), maka dilakukan analisis berdasarkan pada hasil regresi output yang disajikan pada tabel 4.22.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk dimensi transparansi (X4) adalah $t = 0,684$. t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel yang dicari dengan $df = n-k (85-5) = 80$. Dengan taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka diketahui t tabel = 1,667.

Jadi dapat diketahui nilai t hitung $< t$ tabel ($0,684 < 1,667$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi kejujuran (pengelolaan keuangan) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan arah hubungan keduanya positif, maka hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.12

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial Transparansi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

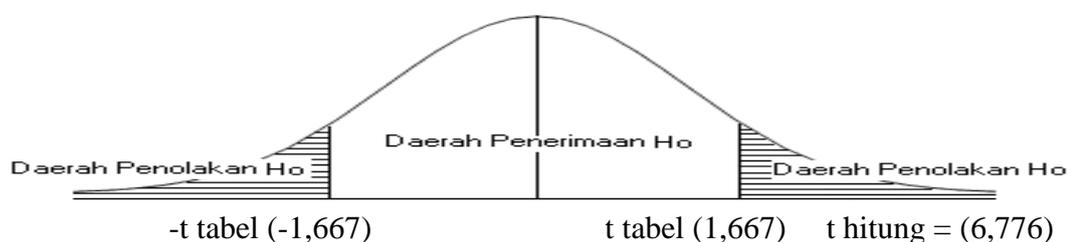
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,496 atau lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

5. Pengaruh Dimensi Pengendalian (Pengelolaan Keuangan) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari dimensi pengendalian (pengelolaan keuangan) X5 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat (Y), maka dilakukan analisis berdasarkan pada hasil regresi output yang disajikan pada tabel 4.22.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk dimensi pengendalian (X5) adalah $t = 6,776$. t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel yang dicari dengan $df = n-k (85-5) = 80$. Dengan taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka diketahui t tabel = 1,667.

Jadi dapat diketahui nilai t hitung $>$ t tabel ($6,776 > 1,667$) maka H_a diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara dimensi pengendalian (pengelolaan keuangan) terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan arah hubungan keduanya positif, maka hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.13
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 pada Uji Parsial Pengendalian terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa t hitung berada pada daerah penolakan H_0 yang berarti terdapat pengaruh positif antara pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah adalah signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

4.5.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Untuk mengetahui nilai F test dapat diketahui dari nilai signifikansi pada tabel dalam output regression SPSS versi 20 *for windows*. Uji simultan digunakan untuk membuktikan selanjutnya yaitu mencari nilai pengaruh kedua variabel pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Uji simultan dapat dihitung dengan SPSS 20 sebagai berikut :

Tabel 4.23
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1446.641	5	289.328	37.670	.000 ^b
	Residual	606.770	79	7.681		
	Total	2053.412	84			

a. Dependent Variable: kinerja pemda

b. Predictors: (Constant), pengendalian, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, value for money

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner melalui program SPSS 20

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa F hitung berada pada daerah penolakan H_0 yang berarti terdapat pengaruh positif antara pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan pada tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga menunjukkan hubungan antara pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah adalah signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

4.5.4. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen (%) besarnya pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel (y). Perhitungan dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi *product moment pearson* dan dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan perhitungan koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan program *SPSS versi 20 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.24
Hasil Koefisien Determinasi Variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Variabel Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.839 ^a	.705	.686	2.771	.705	37.670	5	79	.000

- a. Predictors: (Constant), pengendalian, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, value for money
 b. Dependent Variabel: Kinerja pemda

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner melalui pogram SPSS 20.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,839 atau 70,3%. Hal inii menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian) terhadap variabel dependen yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 70,3% . Sedangkan sisanya sebesar 29,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti oleh peneliti.

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai R adalah sebesar 0,839 yang dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd (0,839)^2 \times 100\% = 70,3 \%$$

Tabel 4.25

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Determinasi

0 % ≤ KD ≤ 100	Tingkatan Hubungan
81 % - 100 %	Sangat Tinggi
49 % - 80 %	Tinggi
17 % - 48 %	Cukup Tinggi
5% - 16 %	Rendah tapi pasti
0% - 4 %	Rendah / lemah sekali

Sumber : Sugiyono (2012 : 183)

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 70,3% masuk dalam kriteria pengaruh yang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan memiliki peran yang cukup penting terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Dimensi Akuntabilitas Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis pertama H_a dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Hasil analisis pengujian secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,288, karena berada di atas nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Dengan demikian penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah karena dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan melaporkan hasil kerjanya selama periode tertentu kepada pemerintahan pusat dan otoritas tertingginya serta mempertanggungjawabkan anggarannya dengan membuat laporan keuangan kepada BPK untuk selanjutnya diperiksa. Oleh karena itu akuntabilitas untuk pemerintah Kabupaten Bandung Barat bukan indikator yang harus diteliti lagi demi mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik karena sudah dilaksanakan dengan baik.

Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Krina (2003) bahwa variabel akuntabilitas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, karena memiliki hubungan yang sangat erat, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika dilihat dari definisi akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)” yang menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesisnya akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan memperoleh nilai signifikansi $0,474 > 0,05$. Penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Kinerja pemerintah dikatakan baik juga apabila setiap perencanaan pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal dari perencanaan salah satunya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi dalam penelitiannya tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan awal tidak sama dengan pencapaian hasil akhir karena ada saja yang gagal.

4.6.2. Pengaruh Dimensi *Value For Money* Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis kedua H_a dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh *value for money* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Hasil analisis pengujian secara parsial

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, karena berada dibawah nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka H2 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara *value for money* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Dengan demikian penyebab *value for money* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah karena dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada indikator kualitas mendapat respon terendah sehingga ini berpengaruh pada kinerja pemerintah. Dimana kualitas jasa atau produk yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan anggaran Negara mendapat nilai yang rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam menghasilkan jasa atau produk baik dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Halim (2007) bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada kinerja *value for money*. Adapun Mardiasmo (2009) mengungkapkan sehubungan dengan kinerja tersebut mengatakan bahwa pengembangan indikator kinerja keuangan sebaiknya memusatkan perhatian pada pelaksanaan konsep *value for money* yang didasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang mendasar *value for maoney* maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja.

Penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman Tri Wandari, Edy Sujana dan I Made Pradana Adi Putra (2015) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Intenal terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng”.

Dalam hasil pengujian hipotesisnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money dengan nilai t hitung sebesar 2,281, 3,921, 4,196, dan 3,193 dengan nilai t tabel 2,021.

4.6.3. Pengaruh Dimensi Kejujuran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis yang ketiga H_3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Hasil analisis pengujian secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,274, karena berada diatas nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka H_3 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Dengan demikian penyebab kejujuran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah karena dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan tugas dan kewajibanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing ini dilihat dari tanggapan responden yang paling tertinggi yaitu tentang responden menjunjung tinggi kejujuran dan sangat menghindari penyalahgunaan anggaran. Untuk mengukur tingkat kejujuran ini termasuk dimensi yang sulit juga untuk dibuktikan kebenarannya, karena tidak semua responden dapat menjawab pernyataan kuesioner dengan terbuka. Beberapa responden / pegawai memilih untuk menutupi segala bentuk kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini

disebabkan karena mereka takut dengan atasan yang selalu mengontrol setiap sikap dan perilaku karyawan dalam melakukan pekerjaan.

Tetapi kejujuran menurut Jill Dann dalam Mangkunegara (2005) dapat mengembangkan kompetensi diri yang efektif karena kejujuran dapat membangun kepercayaan melalui keandalan diri dan perilaku yang seusai, bertindak etis dan tidak melakukan tindakan-tindakan tercela, mengakui kekurangan diri sendiri, memegang teguh nilai-nilai luhur, serta mengantisipasi kesalahan yang terkadang dilakukan.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Saskia Kencana Murti (2014) yang berjudul “Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Ketidakpuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Usaha Kecil Manisan Buah Harpaan Berkah” menyatakan bahwa kejujuran memiliki pengaruh sangat nyata terhadap kinerja karyawan. Koefisien regresi sebesar 0,175 menunjukkan bahwa semakin besar kejujuran akan menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,175. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kejujuran karyawan maka semakin tinggi kinerja karyawan.

4.6.4. Pengaruh Dimensi Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis yang keempat H_4 dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Hasil analisis pengujian secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,496, karena berada diatas nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka H_4 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Dengan

demikian penyebab transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah karena pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan transparansi baik kepada pemerintah pusat / otoritas tertinggi maupun kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan melaporkan kinerja dan Realisasi Anggarannya dengan periode-periode tertentu dalam halaman websitenya yaitu www.kabupaten_bandungbarat.go.id. Sehingga transparansi bukan menjadi tolak ukur lagi untuk menguji kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetapi ada variabel lain yang berpengaruh dan harus ditingkatkan lagi pelaksanaannya yaitu pengawasan atau pengendalian.

Penelitian ini sesuai teori dengan yang dikemukakan oleh Krina (2003) bahwa variabel tersebut tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, karena memiliki hubungan yang sangat erat, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini berarti menolak transparansi yang dikemukakan oleh Surya (2006) yang menyatakan bahwa kepentingan manajemen dan karyawan juga akan terkait dengan prinsip transparansi, karena dengan adanya pengetahuan yang menyeluruh terhadap kondisi perusahaan, secara psikologi karyawan dapat bekerja dalam kondisi yang lebih tenang dan lebih kondusif.

Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih Muji Astuti (2013) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaann Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten Grobogan dengan nilai sig sebesar $0,266 > 0,05$ nilai signifikansi yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.6.5. Pengaruh Dimensi Pengendalian Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis yang kelima H_5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Hasil analisis pengujian secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, karena berada dibawah nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 maka H_5 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan. Dengan demikian penyebab pengendalian berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah karena dalam pelaksanaan pemerintah daerah menurut tanggapan responden indikator pengawasan secara represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mendapat nilai terendah. Artinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan anggaran dilaksanakan dirasa kurang sehingga berpengaruh kepada kinerja pemerintah daerah KBB ini dan mendapat opini dari BPK yaitu WDP. Untuk itu dalam meningkatkan kinerjanya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus meningkatkan pengendalian atau pengawasan secara represif dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan UU No 1 Tahun 2004 pasal 58 “bahwasannya dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur

dan menyelenggarakan pengendalian intern dilingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan pemerintah”.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Vetty Rebecca TH Panjaitan (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Bagian Keuangan (Studi pada SKPD Kota Dumai)”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa nilai $\text{sig } 0,026 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik.

4.6.6. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hipotesis yang keenam H_a dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian secara bersama-sama terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis pengujian bersama-sama dari variabel yang di uji dengan menggunakan regresi linear berganda memperoleh nilai 8,627 artinya setiap peningkatan pelaksanaan dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian sebesar satu satuan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 8,627 yang berpengaruh kearah positif. Dari hasil analisis secara simultan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, karena berada dibawah nilai signifikansi yang

ditetapkan yaitu 0,05 maka H₆ diterima, artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian sebagai dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada bagian keuangan, selain itu variabel akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian diperoleh angka R² (*R Square*) sebesar 0,839 atau 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian) terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah sebesar 70,3% . Sedangkan sisanya sebesar 29,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dengan demikian kinerja pemerintah akan meningkat jika pengelolaan keuangannya dilakukan dengan baik.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:40) bahwa “pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pengelolaan keuangan merupakan pertanggungjawaban sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada.”

Penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vivid Annisa (Universitas Riau, 2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari perolehan nilai t

hitung sebesar (3,035) dan t tabel sebesar (1,990) serta P value sebesar (0,003) < 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t tabel dan tabel nilai P value < (0,05), maka hasil penelitian ini adalah H₀ ditolak dan H₂ diterima, yaitu variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkatnya pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat pula.

Adapun menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eri Wildan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016) “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Bagian Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya” menjelaskan bahwa dimensi pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja sebesar 73%, kejujuran berpengaruh terhadap sebesar 44,2%, transparansi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 71%, pengendalian berpengaruh terhadap kinerja sebesar 74,6% dan pengaruh akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja sebesar 75,8% dapat diinterpretasikan bahwa nilai tersebut termasuk kedalam kategori tinggi, sedangkan sisanya 24,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi tentang pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas sebagai bentuk dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,288 > 0,05$.
2. Terdapat pengaruh *value for money* sebagai bentuk dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$
3. Tidak terdapat pengaruh kejujuran sebagai bentuk dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,274 > 0,05$.
4. Tidak terdapat pengaruh transparansi sebagai bentuk dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,496 > 0,05$.

5. Terdapat pengaruh pengendalian sebagai bentuk dimensi dari pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,00 > 0,05$.
6. Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nilai signifikan $0,00 > 0,05$.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat lebih memperhatikan dan meningkatkan *factor value for money* khususnya dalam hal kualitas yang dihasilkan dalam setiap kegiatan maupun program yang dilakukan baik itu jasa ataupun produk. Hal ini mendapat nilai yang paling rendah dari tanggapan responden sehingga perlu adanya peningkatan kualitas produk atau jasa yang lebih baik lagi.
2. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung lebih memperhatikan dan meningkatkan lagi pengawasan secara represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah anggaran program atau kegiatan sudah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pengawasan secara represif ini mendapat nilai terendah dari indikator pengendalian lain dan dirasa kurang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah tidak baik. Untuk

meingkatkan kinerja aparatur pemerintah kearah yang lebih baik lagi maka perlunya peningkatan pengawasan secara represif oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat memperhatikan dan melakukan peningkatan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disarankan oleh BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan opini dari WDP menjadi WTP.
4. Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat hendaknya mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti pemberlakuan nya kepemimpinan, reward and punishment kepada seluruh dinas atau OPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik.
5. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah misalnya sistem akuntansi keuangan, kepemimpinan, sikap, dan lain-lain
6. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung kepada responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
7. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah jumlah responden penelitian, sehingga memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

Agus, Dharma. 2003. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : CV. Pustaka Setia

_____. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.

_____. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia

Anggarini, Yunitadan Puranto, Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta :Kencana

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset

- Indah Mindarti, Lely. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. Malang : UB Press
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEE
- _____. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPEE
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Ridwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sedermayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: MandarMaju
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Soleh, Chabib dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada

Veithzal, Rivai dan Fauzi, Ahmad. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

KARYA TULIS ILMIAH

Annisa, Vivid. 2017. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon. Vol. 04 No. 01.

Astuti, Ratih Muji. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi kasus*

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Haqiqi, Eri Wildan. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Jitmau, Fanny. dkk. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”. Vol. 08 No. 01.

Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Murti, Saskia Kencana. 2014. *Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Ketidakpuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Usaha Kecil Manisan Buah Harapan Berkah*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Panjaitan, Vetty Rebecca TH. 2015. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Bagian Keuangan (Studi pada SKPD Kota Dumai)*. Jurnal Fakultas Ekonomi (Fekon). Vol. 02. N0. 02

Putra, Nopriyansyah. Erlina dan Sari. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi. Vol. 19 No. 04

Ratna, Ikhwani dan Nasrah, Hidayati. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerpaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 19 No. 01

Wandari, Desak Nyoman Tri, dkk. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng*. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 03 No. 01

DOKUMEN

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017.

PeraturanPerundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab X Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 58

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 1